

**SKRIPSI**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA  
PANTAI SAMBOANG DI KABUPATEN BULUKUMBA**

**NURMANIKA**

**Nomor Stambuk : 105610466113**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2018**

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN OBJEK  
WISATA PANTAI SAMBOANG DI KABUPATEN BULUKUMBA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan diajukan oleh

NURMANIKA

Nomor stambuk : 105610466113

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2018**

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi Penelitian : Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Objek  
Wisata Pantai Samboang di Kabupaten Bulukumba  
Nama Mahasiswa : Nurmanika  
Nomor Stambuk : 10561 04661 13  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui

Pembimbing I

  
**Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd**

Pembimbing II


  
**Adnan Ma'ruf, S.Sos, M.Si**

Mengetahui :

  
Dekan  
Fisipol Unismuh Makassar

  
**Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos, M.Si**

Ketua Jurusan  
Ilmu Administrasi Negara

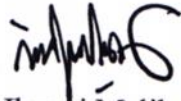
  
**Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si**

## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh tim penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan Penguji ujian Skripsi dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0338/FSP/A.I-VIII/II/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara Di Makassar pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018.

## TIM PENILAI

Ketua



Dr. Hj Ihyani Malik, S.Sos. M.Si

Sekretaris



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji

1. Dr. H. Mappamiring, M.Si (ketua)
2. Dra. Hj. Musliha Karim, M.Si
3. Drs. Ruskin Azikin, MM
4. Adnan Ma'ruf, S.Sos, M.Si



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurmanika

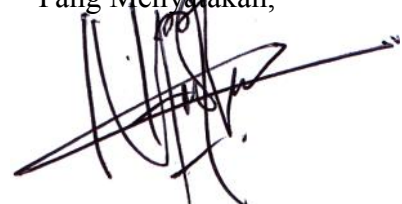
Nomor Stambuk : 1056104661 13

Program Studi : Ilmu Administasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 22 desember 2017

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Nurmanika

## **Abstrak**

**Nurmanika, tahun 2017, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Samboang Dikabupaten Bulukumba (dibimbing oleh Ansyari Mone dan Adnan Ma'ruf)**

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata Pantai Samboang di Kabupaten Bulukumba, yang dimana permasalahannya adalah pantai samboang belum banyak dikenal dan belum terlalu dilirik oleh wisatawan lokal.

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Samboang di Kabupaten Bulukumba dan untuk mengetahui Faktor Pendukung dan faktor Penghambat Partisipasi masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Samboang Di kabupaten Bulukumba

Tipe penelitian ini menggunakan tipe pendekatan fenomenologi dengan berusaha memahami makna pariwisata. Jenis penelitian ini menggunakan Metode penelitian Kualitatif, penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, dasar penelitian yang dilakukan adalah dekskriptif kualitatif yaitu penulis bermaksud untuk memberikn gambaran atau kejelasan mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata Pantai Samboang di Kabupaten Bulukumba yang penulis mewawancarai 8 orang, sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan laporan-laporan maupun prinsip arsip-arsip resmi yang didukung oleh kelengkapan data primer.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata Pantai Samboang di Kabupaten Bulukumba adalah partisipasi dalam bentuk Partisipasi Harta adalah masyarakat menyumbangkan harta untuk pelebaran jalan dan menghibahkan tanahnya sebagai fasilitas wisata (pembangunan Villa), Partisipasi Tenaga adalah masyarakat Kecamatan Bonto Tiro bergotong royong dalam hal kebersihan, dan meramaikan acara-acara kemerdekaan, Partisipasi Pemikiran/Ide adalah rencana pembuatan kolam renang dan akan diadakan event pemancingan tingkat provinsi. Faktor pendukung adalah kesiapan pemerintah dalam melihat kebutuhan utama objek wisata dan dukungan nyata yang diberikan pemerintah untuk masyarakat. Faktor penghambat adalah masyarakat kurang sadar wisata berakibat kurang wisatawan yang berkunjung sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat, tingginya tarif retribusi dan kurangnya fasilitas di Pantai Samboang

Kata kunci : Partisipasi, Pengelolaan Pariwisata

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu alaikum warahma tullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Samboang di Kabupaten Bulukumba”. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan tak lupa penulis khaturkan salam, shalawat kepada Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya dari alam gelap gulita menuju alam yang terang menderang seperti saat sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang tentunya dengan sepenuh hati meluangkan waktu dengan ikhlas memberikan informasi yang di butuhkan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga terkhusus pada dosen pembimbing bapak Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd selaku pembimbing I dan bapak Adnan Ma'ruf, S.Sos., M.Si selaku pembimbing II yang dengan tulus membimbing penulis, meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan masukan. Melakukan koreksi dan perbaikan-perbaikan yang amat berharga sejak awal hingga selesainya skripsi ini. Gagasan-gagasan beliau merupakan kenikmatan intelektual yang tak ternilai harganya. Teriring doa semoga Allah SWT menggolongkan upaya-upaya beliau bernilai ibadah.

Selanjutnya pada kesempatan ini penulistik lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos,M.Si selaku Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak Dr. Burhanuddin S.Sos, M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Kedua orang tua tercinta yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mengarahkan dan sanantiasa mendoakan serta memberi dukungan yang tiada ternilai baik moral maupun materi serta nasehat dan pengorbanan yang tak terhingga dalam melalui hari dalam kehidupan ini.
6. Para pihak Dinas kebudayaan dan Pariwisata yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Para pihak kecamatan Bonto Tiro, Kelurahan Ekatiro Lingkungan Ere Lebu Timur, tokoh masyarakat, masyarakat dan wisatawan lokal maupun regional yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan observasi




8. Buat saudara-saudariku tercinta, teman-teman kampus, teman-teman organisasi serta keluarga besar yang senantiasa memberikan motivasi serta bantuan yang tak ternilai baik moral maupun materi kepada penulis.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

WassalamuAlaikumWarahmatullahiWabarakatuh

Makassar, 22 desember 2017



Nurmanika

## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	ii
Penerimaan Tim .....	iii
Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah .....	iv
Abstrak .....	v
Kata pengantar .....	vi
Daftar Isi.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan masalah.....	8
C. Tujuan penelitian .....	8
D. Kegunaan penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep partisipasi .....	10
B. Konsep pengelolaan .....	16
C. Konsep pariwisata .....	25
D. Kerangka pikir .....	28
E. Fokus penelitian .....	29
F. deskripsi fokus penelitian .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan lokasi penelitian .....	31
B. Jenis dan tipe penelitian .....	31
C. Sumber data .....	32
D. Informan penelitian .....	32
E. Teknik pengumpulan data .....	33
F. Teknik analisis data .....	35
G. Keabsahan data .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Objek Penelitian .....	37
1. Gambaran Umum Kabupaten Bulukumba .....	37
2. Keadaan Geografis dan Keadaan Topografi Kabupaten Bulukumba .....	38
3. Keadaan Penduduk .....	42
4. Kantor dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Bulukumba ...	42
5. Visi dan Misi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata.....	43
6. Struktur organisasi dinas kebudayaan dan pariwisata .....	46
7. Sumber Daya SKPD .....	47
8. Gambaran Umum Kecamatan Bonto Tiro .....	48
B. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Samboang di Kabupaten Bulukumba.....	50
1. Partisipasi masyarakat dalam bentuk Harta.....	51

a.	Masyarakat menyumbangkan hartanya untuk pelebaran jalan.	51
b.	Menghibahkan tanahnya sebagai fasilitas wisata .....	53
2.	Partisipasi Masyarakat Dalam Bentuk Tenaga .....	55
a.	Gotong royong dalam hal kebersihan .....	56
b.	Meramaikan acara kemerdekaan .....	58
3.	Partisipasi masyarakat dalam bentuk pemikiran/ ide .....	60
a.	Rencana pembuatan kolam .....	61
b.	Akan diadakan event pemancingan tingkat provinsi.....	63
C.	Faktor pendukung dan penghambat .....	66
1.	Faktor pendukung .....	67
a.	Kesiapan pemerintah .....	67
b.	Dukungan nyata .....	70
2.	Faktor penghambat .....	73
a.	Masyarakat kurang sadar wisata.....	73
b.	Tingginya tariff retribusi .....	78
c.	Kurangnya fasilitas .....	82

## **BAB V PENUTUP**

A.	Kesimpulan .....	84
B.	Saran.....	86

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	87
-----------------------------	----

## **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tempat wisata pantai di Sulawesi-Selatan sangat identik dengan Kabupaten Bulukumba. Banyak sekali Pantai yang terkenal dari wilayah ini seperti Pantai Bira, Pantai Lemo-lemo, dan Pantai Apparalang . Pantai Samboang adalah salah satu spot wisata bahari dengan destinasi pariwisata yang menyuguhkan pesona panorama alam yang indah nan memukau yang ada di Kabupaten Bulukumba, dan tentunya Pantai Samboang telah dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bulukumba pada tahun 2013 dengan ciri khas dan daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Kawasan wisata Pantai Samboang merupakan lokasi wisata pilihan keluarga bagi para pengunjung yang ingin menikmati keindahan dan panorama pantai yang eksotis, layaknya eksotisme Tanah Lot di pulau Dewata Bali.

Hampan pasir putih selembut salju disepanjang bibir Pantai terbentuk dari lekukan bibir pantai yang landai *plus* gugusan perbukitan yang ditumbuhi beraneka ragam pepohonan rindang terlihat sempurna di sisi kanan dan kiri pantai, Penepatan kawasan Pantai Samboang sebagai salah satu destinasi pariwisata turut didukung dengan keindahan panorama alam terumbu karang bawah lautnya yang tak kalah eksotis dari Pantai Tanjung Bira yang memikat hati para pengunjung. Area pemandangan yang satu ini menjadikan magnet tersendiri bagi wisatawan. Pantai Samboang yang ada di kabupaten Bulukumba. Banyak yang tak

menyangka bahwa alam ini terkesan liar ternyata dibalik itu tersembunyi sebuah panorama pantai yang eksotis, bahkan ada yang kemudian menyebut kawasan Pantai Samboang memiliki kemiripan dengan Tanah Lot yang ada di Pulau Dewata Bali, yang namanya sudah tersohor keberbagai pejuru Negeri. Dan lebih uniknya lagi yang bisa ditemui dikawasan Pantai Samboang adalah adanya kuburan di bibir Pantai serta terdapat *spot* cantik berupa karang kecil yang bisa digunakan untuk menyalurkan hoby para wisatawan seperti memancing dengan alur jembatan berjarak sekitar 20 meter dari bibir Pantai, yang disebut sebagai Pantai Tanjung Tiro.

Pantai Samboang belum banyak dikenal dan belum terlalu dilirik oleh wisatawan lokal (*domestic*), wisatawan regional maupun wisatawan mancanegara. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Aparat Pemerintah Kabupaten untuk terus mengalakkan pengembangan sarana dan prasarana pendukung untuk menarik minat wisatawan. Menanggapi minimnya sarana dan prasarana penunjang pariwisata di kawasan Pantai Samboang, Kasubag Perencanaan Dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Bulukumba, Yusli (2013) menyatakan pada tahun ini pihaknya telah menyiapkan *Master Plan* pengembangan Pantai Samboang sebagai kawasan wisata bahari dengan memberdayakan segenap potensi yang ada disekitar area Pantai Samboang deangan menyulap area Pantai Samboang sebagai *Sport Diving*, seperti keindahan alam. Melihat sumber daya yang ada di Kelurahan Eka Tiro Kecamatan Bonto Tiro memiliki kemelokan pasir putih dan keindahan bawah lautnya yang jauh lebih memukau bila dibandingkan dengan Taman Laut Nasional Taka Bone Rate di Kepulauan Selayar. Akan tetapi, sebelumnya

masyarakat setempat telah membangun sekitar 10 unit sarana pendukung berupa bangunan bungalow yang dibiayai dengan dana swadaya murni masyarakat.

Pembangunan sektor pariwisata juga memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan perekonomian suatu daerah pada khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya. Oleh karena itu pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata merupakan salah satu langkah yang sangat tepat khususnya dalam memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Hal ini sesuai dengan apa yang terkandung dalam tujuan pembangunan kepariwisataan yang dinyatakan dalam undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan yang berbunyi sebagai berikut: “memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu daya tarik wisata”. Memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa, memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, mendorong produksi nasional”.

Pemerintah mengharapkan sektor pariwisata turut menopang perekonomian Indonesia yang beberapa tahun terakhir ini sedang dilanda krisis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa salah satu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah maupun devisa bagi Negara adalah sektor pariwisata, dimana apabila sektor pariwisata tersebut dikembangkan secara optimal di harapkan akan dapat menunjang pelaksanaan pembangunan diberbagai daerah, sehingga pendapatan masyarakat secara otomatis dapat ditingkatkan, karena dengan pengembangan pariwisata akan terjadi pula perluasan kesempatan

kerja sekaligus membuka peluang bagus bagi sektor lain. Tetapi disamping memberi manfaat yang cukup besar, sektor pariwisata juga memungkinkan akibat yang negatif yang perlu dihindari, seperti *distorsi* terhadap masyarakat lokal, *degradasi* lingkungan, hilangnya identitas dan integritas bangsa. Sehingga dalam mengembangkan sektor pariwisata harus diperhitungkan pula mengenai aspek masyarakat dan kebudayaan yang termasuk didalamnya norma-norma yang ada di masyarakat.

Keppres Nomor 38 tahun 2005 mengamanatkan bahwa seluruh sektor mendukung pembangunan pariwisata Indonesia. Hal ini merupakan peluang bagi pembangunan pariwisata Indonesia. Apalagi pemerintah sudah merancang bahwa pariwisata harus menjadi andalan pembangunan Indonesia. Kebijakan ini memberikan beberapa implikasi antara lain perlu adanya pembenahan yang menyeluruh diberbagai sektor. Namun tentunya agar lebih efisien dan potensi pembangunan kepariwisataan tersebut diperlukan suatu *flatfrom* pembangunan pariwisata yang berpotensi kepada *trend* kepariwisataan global masa kini dan masa depan.

Pemerintah dalam mengembangkan sektor pariwisata sebagai suatu aset yang potensial diperlukan suatu strategi atau usaha terpadu dengan pola pengembangan pariwisata yang terencana serta menyeluruh, sehingga potensi alam dan budaya yang dimiliki tetap terjaga dan tidak tercemari. Pemerintah daerah harus berupaya agar pengembangan pariwisata dilakukan dengan dengan selalu menghindarkan atau mengambil langkah-langkah yang mempunyai dampak

atau akibat yang paling sedikit atau seminimal mungkin, sehingga resiko yang ditanggung oleh pemerintah daerah tidak terlalu berat.

Lampiran II.11 Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21, tahun 2012 tanggal 20 desember 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Bulukumba Tahun 2012-2032. Kawasan Wisata Alam Pantai Samboang, terdapat di Samboang Kecamatan Bonto Tiro. Kabupaten Bulukumba sebagai salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi-Selatan yang memiliki banyak potensi yang belum dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal. Ini terkesan bahwa objek wisata yang lain terkesan belum memberikan kontribusi yang berarti bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah kabupaten Bulukumba. Oleh karena itu, pemerintah daerah mengambil kebijakan untuk melakukan pembangunan di sektor wisata yang diharapkan mampu memberi kontribusi yang cukup berarti bagi pengembangan daerah, sehingga tolak ukur keberhasilan dari usaha tersebut tidak hanya terbatas pada kesuksesan rencana dan pelaksanaan program pengembangan pariwisata, akan tetapi seberapa besar sektor pariwisata mampu memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.

Langkah positif dalam pengembangan pariwisata, diperlukan adanya upaya-upaya dari pemerintah daerah secara aktif, menyeluruh dan berkesinambungan untuk mengembangkan potensi pariwisata terutama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga masyarakat menjadi termotivasi untuk turut serta atau berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah maupun pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan



pariwisata pada khususnya. Objek wisata, banyak tersebar diseluruh wilayah Indonesia.

Peningkatan, pengembangan dan pengelolaan kepariwisataan Pantai Samboang tidak lepas dari peran serta masyarakat dan pihak swasta dalam sektor tersebut. Agar industri pariwisata dapat berkembang dengan baik maka masyarakat dan swasta harus terlibat di dalamnya. Untuk itu pemerintah Kabupaten Bulukumba harus mendidik masyarakat dan pihak swasta menjadi masyarakat yang “sadar wisata”, artinya mereka sadar dan mengerti bahwa sektor pariwisata merupakan sektor yang menghasilkan devisa bagi Negara yang cukup besar dan diperlukan untuk membiayai pembangunan nasional dan pada khususnya kabupaten Bulukumba serta dapat memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.

Pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba dan masyarakat lokal menjadikan Pantai Samboang sebagai salah satu daerah obyek wisata andalan karena pantai ini belum banyak tersentuh tangan oleh para wisatawan, dengan beberapa pertimbangan disamping keelokan, keaslian budaya juga keindahan alam serta hamparan pasir putih yang begitu luas dan pemandangan yang menyejukkan hati. Dengan adanya kemajuan wisata di Kabupaten Bulukumba akan meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengingat pada kenyataannya wilayah Kabupaten Bulukumba lebih cenderung sebagai daerah tujuan wisata untuk rekreasi sehingga dengan dikelola dan dikembangkannya, objek wisata yang abadi nantinya juga akan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Bulukumba sendiri.

Partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran program pemerintah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Keberhasilan dalam mencapai sasaran pelaksanaan program pembangunan bukan semata-mata didasarkan pada kemampuan Aparatur Pemerintah, namun berkaitan juga dengan upaya mewujudkan kemampuan dan keamanan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Adanya partisipasi masyarakat akan mampu mengimbangi keterbatasan biaya dan kemampuan pemerintah dalam mencapai pelaksanaan program pembangunan tersebut, partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang tidak bisa ditinggalkan dalam pembangunan (kehutanan), yang dapat mempunyai arti luas dan pengertian yang sempit.

Menurut Awing (2012), partisipasi dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu: (1) cara pandang dimana partisipasi itu merupakan kegiatan pembagian massal dari hasil pembangunan; (2) cara pandang dimana masyarakat secara massal telah menyumbang jerih payah dalam pembangunan; (3) dan bahwa partisipasi harus terkait dengan proses pengambilan keputusan di dalam pembangunan. Dengan harapan Pantai Samboang tetap banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik lokal, regional maupun mancanegara, namun berdasarkan fakta lapangan dan hasil observasi berkelanjutan bahwa Pantai Samboang adalah pantai yang paling minim pengunjung (nyaris tidak ada), fasilitas sarana dan prasarana yang tidak terawat, sampah kiriman berserakan disepanjang bibir pantai, serta banyaknya balapan liar.

Peneliti memilih Pantai Samboang sebagai lokasi penelitian dengan alasan di pantai tersebut minim pengunjung, fasilitas sarana dan prasarana tidak

terawat, sampah kiriman yang berserakan serta balapan liar. Terutama dalam pengelolaan objek wisata Pantai Samboang masih menjadi pertanyaan besar bagi peneliti sehingga tertarik untuk meneliti bagaimana “*partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wisata Pantai Samboang*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Samboang di Kabupaten Bulukumba ?
2. Apa Faktor Pendukung dan faktor Penghambat Partisipasi masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Samboang Di kabupaten Bulukumba ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Samboang di Kabupaten Bulukumba
2. Untuk mengetahui Faktor Pendukung dan faktor Penghambat Partisipasi masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Samboang Di kabupaten Bulukumba

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teori
  - a. Sebagai bahan sumbangsi dan informasi serta bahan masukan bagi peneliti selanjutnya.
  - b. Sebagai bahan literatur bagi peneliti selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang partisipasi masyarakat di Wisata Pantai Samboang Kabupaten Bulukumba.
2. Kegunaan praktis
  - a. Peneliti diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi tentang wisata Pantai Samboang yang ada di Kabupaten Bulukumba.
  - b. Dapat bermamfaat dalam pemenuhan ilmu pengetahuan di bidang Administrasi Negara pada khususnya dalam meningkatkan potensi wisata dan sebagai bekal dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan partisipasi kemasyarakatan

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Partisipasi**

Verhagen dalam Setiawan (2015: 9) menyatakan bahwa partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembangunan, kewenangan, tanggung jawab dan manfaat, sehubungan dengan hal itu, berbagai kegiatan partisipasi akan mencakup:

1. Menjadi anggota kelompok masyarakat
2. Melibatkan diri dalam kegiatan diskusi kelompok
3. Melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat lain.
4. Menggerakkan sumber daya masyarakat
5. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan
6. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dalam kegiatan masyarakat.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Pemikiran tentang bentuk partisipasi masyarakat menurut Hamijoyo (2007: 21):

1. Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.

2. Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas
3. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program
4. Partisipasi keterampilan yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakatnya.
5. Partisipasi buah pikiran adalah partisipasi sumbangan berupa ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik yang menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.
6. Partisipasi sosial, partisipasi jenis ini diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban, misalnya arisan, menghadiri kematian dan lainnya, dapat juga berupa sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi

Dusseldrop dalam Slamet (1993: 11) membedakan partisipasi berdasarkan kesukarelaannya, sebagai berikut:

1. Partisipasi bebas yaitu partisipasi yang dilandasi oleh rasa kesukarelaan yang bersangkutan untuk mengambil bagian dalam suatu kegiatan.

2. Partisipasi spontan. Yaitu partisipasi yang terbentuk secara spontan dari keyakinan atau pemahamannya sendiri, tanpa adanya pengaruh yang diterimanya dari penyuluhan atau bujukan yang dikalahkan oleh pihak lain (baik individu maupun lembaga masyarakat)
3. Partisipasi terinduksi atau partisipasi terbujuk, yaitu karena adanya pengaruh, bujukan, penyuluhan dari pemerintah, lembaga masyarakat maupun lembaga sosial setempat atau individu.

Mardikanto (2001). Tahap-tahap partisipasi adalah sebagai berikut:

1. Tahap partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemamfaatan sumber daya lokal dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam hal ini lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau di tingkat lokal

2. Tahap partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sering kali diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya didalam kegiatan pembangunan. Di pihak lain, lapisan yang ada di atasnya (yang umumnya terdiri atas orang kaya) yang

lebih banyak memperoleh mamfaat dari hasil pembangunan, tidak dituntut sumbangannya secara proporsional. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai dan beragam bentuk pengorbanan lainnya yang sepadan dengan mamfaat yang akan diterima oleh warga yang bersangkutan.

### 3. Tahap partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dalam hal ini, Partisipasi masyarakat mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat diperlukan.

### 4. Tahap partisipasi dalam pemamfaatan hasil kegiatan

Partisipasi dalam pemamfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Di samping itu, pemamfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam rangka program pembangunan yang akan datang. Slamet (1993: 3) secara garis besar ada tiga tahapan dalam partisipasi, yaitu partisipasi perencanaan, pelaksanaan dan pemamfaatan hasil.



Secara terperinci pendekatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilakukan melalui:

1. Partisipasi dalam perencanaan (*Idea planning stage*),

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak untuk berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat. Dalam proses ini meliputi menerima dan memberi informasi, gagasan, tanggapan, saran ataupun menerima dengan syarat dan merencanakan pembangunan.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan (*Implementasi stage*),

Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan tenaga, uang waktu dan lain sebagainya.

3. Partisipasi dalam pemamfaatan (*Utilization stage*),

Partisipasi dalam pemamfaatan adalah memetik hasil ataupun pemamfaatan hasil pembangunan tersebut.

Keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi masyarakat, baik dalam masukan (*input*) maupun dalam menikmati hasilnya. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut Slamet dalam Mappamiring (2011: 37) dapat diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan-kegiatan pembangunan dan ikut serta memamfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Berkaitan dengan hal partisipasi ini oleh Syahyuti dalam Mappamiring (2011:39) mengutip pendapat pakar bahwa ada tujuh karakteristik tipologi partisipasi yaitu:

1. Partisipasi pasif atau manipulatif. Ini adalah bentuk partisipasi yang paling lemah, masyarakat menerima pemberitahuan yang sedang dan telah terjadi, pengumuman sepihak oleh pelaksanaan proyek tanpa memperlihatkan tanggapan masyarakat sebagai sasaran program.
2. Partisipasi informatif, disini masyarakat hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk proyek, namun tidak berkesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses keputusan.
3. Partisipasi konsultatif. Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi, sedangkan orang luar mendengarkan, serta menganalisa masalah dan pemecahannya. Dalam pola ini belum ada peluang untuk membuat keputusan bersama.
4. Partisipasi insentif. Masyarakat memberikan korbanan dan jasa untuk memperoleh imbalan insentif berupa upah, walau tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran atau eksperimen-eksperimen yang dilakukan.
5. Partisipasi fungsional. Masyarakat membentuk kelompok sebagai bagian proyek, setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati
6. Partisipasi interaktif. Masyarakat berperan dalam proses analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan penguatan kelembangaan. Pola ini cenderung melibatkan metode interdisipliner yang mencari keragaman prospektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis.
7. Mandiri (*self mobilization*). Masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi oleh pihak luar ) untuk mengubah sistem atau nilai-nilai yang mereka junjung.

Conyer dalam Soetomo (2006:56), mengemukakan partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat secara sukarela yang didasari oleh determinan dan kesadaran diri masyarakat itu sendiri dalam program pembangunan. Ada lima cara untuk melibatkan keikutsertaan masyarakat yaitu:

1. Survey dan konsultasi lokal untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan.
2. Memanfaatkan petugas lapangan, agar sambil melakukan tugasnya sebagai agen pembaharu, juga menyerap berbagai informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan.
3. Perencanaan yang bersifat desentralisasi agar lebih memberikan peluang yang semakin besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi.
4. Perencanaan melalui pemerintah lokal
5. Menggunakan strategi pembangunan komunitas (*community development*).

## **B. Konsep Pengelolaan**

Pengelolaan merupakan istilah yang paling sering dipakai dalam ilmu administrasi. Istilah pengelolaan menurut etimologi berasal dari kata kelola yang artinya menyelenggarakan, menjalankan dan mengurus. Pengertian tersebut mencerminkan bahwa pengelolaan selalu didasarkan atas upaya untuk menjadikan sesuatu lebih bermamfaat dan menitikberatkan pada dua faktor penting yaitu mengurus merubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih cocok dengan kebutuhan-kebutuhan organisasi.

Berbicara tentang pengelolaan, pada dasarnya tidak terlepas dari konteks manajemen, sebagaimana dikemukakan oleh Hamalik (1993:18), bahwa pengelolaan dalam hal ini identik dengan istilah manajemen itu sendiri itu merupakan suatu proses. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian pengelolaan berkaitan dengan pengelolaan berkaitan dengan penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam suatu kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Pengertian pengelolaan yang dikemukakan Soegiyanto (2001:249), bahwa pengelolaan adalah :

1. Proses atau pembuatan kebijakan
2. Menjalankan proses, melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain
3. Proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi
4. Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Pengertian diatas menunjukkan bahwa tujuan dilaksanakannya pengelolaan adalah keseluruhan proses mulai dari pembuatan kebijakan, pelaksanaan dan meningkatkan mutu dari apa yang dikelola serta pengawasan sehingga dapat mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan baik dalam jumlah maupun kualitas yang dihasilkan atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian yang diawali dengan mendirikan, menumbuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai dengan usaha-usaha perbaikan, penyempurnaan dan akhirnya pengembangannya.

Kata “pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Banyak orang yang mengartikan sebagai pengaturan, pengelolaan dan pengadministrasian, memang itu adalah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Griffin mengidentifikasikan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Nanang Fattah, (2004: 1) berpendapat bahwa proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang di tampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasi (*organizing*), pemimpin (*leading*), pengawasan (*controlling*). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses perencanaan, mengorganisasi, memimpin dan pengendalian upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Pengertian manajemen telah banyak dibahas para ahli yang antara satu dengan yang lain saling melengkapi. Stoner yang dikutip oleh Handoko menyatakan bahwa manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Stoner menekankan bahwa manajemen dititik beratkan pada proses dan system. Oleh karena itu, apabila dalam sistem dan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penganggaran, dan sistem pengawasan tidak baik proses manajemen

secara keseluruhan tidak lancar sehingga proses pencapaian tujuan akan terganggu atau mengalami kegagalan. Berdasarkan definisi manajemen diatas secara garis besar tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Perencanaan merupakan proses dasar dari suatu kegiatan pengelolaan dan merupakan syarat mutlak dalam suatu kegiatan pengelolaan. Kemudian pengorganisasian berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan, Sementara itu pengarahan diperlukan agar menghasilkan sesuatu yang diharapkan dan pengawasan yang dekat. Dengan evaluasi, dapat menjadi proses *monitoring* aktivitas untuk menentukan apakah individu atau kelompok memperoleh dan mempergunakan sumber-sumbernya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan.

Fungsi manajemen (pengelolaan) di atas secara garis besar dapat disampaikan bahwa tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi: perencanaan (*planning*) pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi-fungsi manajemen tersebut bersifat universal, di mana saja dan dalam organisasi apa saja. Namun, semuanya tergantung pada tipe organisasi, kebudayaan dan anggotanya. Kegiatan atau fungsi manajemen, meliputi: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*)

a. Perencanaan (*Planning*)

Batasan atau pengertian perencanaan bermacam-macam sesuai dengan pendapat para ahli manajemen. perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan

tertentu, dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksana dan bagaimana tata cara mencapai itu.

Bahwa perencanaan adalah dasar yang akan dikembangkan menjadi seluruh fungsi berikutnya tanpa rencana yang tepat dan pada sebuah organisasi akan kehilangan fokus sentral berpijak bukan sekedar daftar kegiatan yang harus dilakukan. Perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan serangkaian pengambilan keputusan untuk dilakukannya tindakan dalam mencapai tujuan organisasi, dengan dan tanpa menggunakan sumber-sumber yang ada. Dengan demikian kunci keberhasilan dalam suatu pengelolaan atau manajemen tergantung atau terletak pada perencanaannya.

Perencanaan merupakan suatu proses dan kegiatan pimpinan (*manager*) yang terus menerus, artinya setiap kali timbul sesuatu yang baru Perencanaan merupakan langkah awal setiap manajemen. Perencanaan merupakan kegiatan yang akan dilakukan di masa depan dalam waktu tertentu untuk mencapai tujuan tertentu pula. Sebuah perencanaan yang baik adalah yang rasional, dapat dilaksanakan dan menjadi panduan langkah selanjutnya. Oleh karena itu, perencanaan tersebut sudah mencapai permulaan pekerjaan yang baik dari proses pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan uraian diatas, perencanaan pada hakekatnya merupakan proses pemikiran yang sistematis, analisis. dan rasional untuk menentukan apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa pelaksananya, dan kapan kegiatan tersebut harus dilakukan.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan pengelompokan kegiatan-kegiatan penugasan kegiatan-kegiatan penyediaan keperluan, wewenang untuk melaksanakan kegiatannya. Dalam suatu organisasi dituntut adanya kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien. Organisasi merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, pengelompokan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu dipilih orang yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu, perlu memilih dan menentukan orang yang akan dipercaya atau di posisikan dalam posisi tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diperhatikan dalam hal proses penarikan, penempatan, pemberian latihan dan pengembangan anggota-anggota organisasi.

c. Pengarahan (*Actuating*)

Pengarahan adalah keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya demi kepentingan jangka panjang perusahaan. Termasuk didalamnya memberitahukan orang lain apa yang harus dilakukan dengan nada yang bervariasi mulai dari nada tegas sampai meminta atau bahkan mengancam. Tujuannya adalah agar tugas-tugas dapat terselesaikan dengan baik.

Pengarahan berarti para manajer mengarahkan, memimpin dan mempengaruhi bawahan. Manajer tidak melakukan semua kegiatan sendiri, tetapi menyelesaikan tugas-tugas esensial melalui orang-orang lain. Mereka juga tidak



sekedar memberikan perintah, tetapi menciptakan iklim yang dapat membantu para bawahan melakukan pekerjaan secara paling baik. Fungsi pengarahan adalah suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis, dan lain sebagainya.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya (Sutarno NS, 2004: 128). Pengawasan atau kontrol yang merupakan bagian terakhir dari fungsi manajemen dilaksanakan untuk mengetahui;

- a) Apakah semua kegiatan telah dapat berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya.
- b) Apakah didalam pelaksanaan terjadi hambatan, kerugian, Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, penyimpangan dan pemborosan.
- c) Untuk mencegah terjadinya kegagalan, kerugian, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang penyimpangan, dan pemborosan.
- d) Untuk meningkatkan efisien dan efektifitas organisasi.

Tujuan pengawasan adalah:

1. Menentukan dan menghilangkan sebab-sebab yang menimbulkan kesulitan sebelum kesulitan itu terjadi.

2. Mengadakan pencegahan dan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi.
3. Mendapatkan efisiensi dan efektifitas. Dengan demikian, perencanaan merupakan proses awal dari suatu kegiatan pengelolaan yang keberadaanya sangat diperlukan dalam memberikan arah atau patokan dalam suatu kegiatan, kemudian pengorganisasian berkaitan dengan penyatuan seluruh sumber daya yang ada untuk bersinergi dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan. Tahap berikutnya pengarahan dan pelaksanaan kegiatan yang selalu berpedoman pada perencanaan yang telah ditetapkan. Tahap terakhir adalah pengawasan yang meliputi kegiatan monitoring evaluasi tersebut, dapat dilakukan perbaikan selama kegiatan sehingga tujuan yang telah direncanakan tercapai dengan baik.

Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada pasal 5 Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997, bahwa masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Untuk mendapatkan hak tersebut, pada pasal 6 dinyatakan bahwa masyarakat dan pengusaha berkewajiban untuk berpartisipasi dalam memelihara kelestarian fungsi lingkungan, mencegah dan menaggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Terkait dengan ketentuan tersebut, dalam undang-undang nomor 18 tahun 2008 secara eksplisit juga dinyatakan, bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban dalam mengelola sampah. Dalam hal pengelolaan sampah pasal 12 dinyatakan, setiap orang wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara berwawasan lingkungan.

Masyarakat juga dinyatakan berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah. Cara partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan tatanan sosial budaya daerah masing-masing. Berangkat dari ketentuan tersebut, tentu menjadi kewajiban dan hak setiap orang baik secara individu maupun kolektif; demikian pula kelompok masyarakat pengusaha dan komponen masyarakat lain untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan perkotaan dan pedesaan yang baik, bersih dan sehat.

Pengertian pengelolaan identik dengan pengertian manajemen. Pengertian manajemen menurut George R. Terry, Ph.D, dalam bukunya *Princtple of Management* dikatakan bahwa *management is distinct process consisting of planning, organizing, actuating and controlling performed to determine and accomplish stated objective by the use of human being and other resources*. Manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan/pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya Hasibuan (1995 : 03).

Manajemen/pengelolaan menurut Prof. Dr. Prajudi, SH., dapat dipandang sebagai:

- a. Orang-orang: semua orang yang mempunyai fungsi pokok sebagai pemimpin-pemimpin kerja

- b. Proses: adanya kegiatan-kegiatan ke arah ke bawah, jadi berupa kerja untuk mencapai tujuan tertentu
- c. Sistem kekuasaan/wewenang: wewenang supaya orang-orang menjalankan pekerjaannya (Moekijax, 1984 : 07)

Manurut John D. Millet dalam bukunya *Management in The Public Service*, mengatakan bahwa: "*Management is the process directing and facilitating the work of people organized in formal group to achieve a desire and* " Manajemen adalah proses pembimbingan dan pemberian fasilitas terhadap pekerjaan-pekerjaan yang terorganisir dalam kelompok formal untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki (Hasibuan,1995 : 05)

### **C. Konsep Pariwisata**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 pasal 1 (b) tentang kepariwisataan memberikan pengertian tentang pariwisata bahwa pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk objek dan daya tarik wisata dan usaha-usaha dibidang tersebut. Selanjutnya pasal 1 (c) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. Oleh karena itu unsur-unsur pengertian pariwisata meliputi manusia, kegiatan, motivasi, sasaran dan usaha pariwisata yang terdiri atas tiga golongan yaitu usaha jasa pariwisata, usaha sarana pariwisata, pengusaha objek dan daya tarik wisata perencanaan, pengaturan penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian serta pengawasan (Mukarram, 2010:21-22).

Wahab (2003:9) memberikan ringkasan mengenai manfaat pariwisata bagi suatu Negara yang dapat dijabarkan sebagai faktor penting untuk menggalang persatuan bangsa yang rakyatnya memiliki daerah yang berbeda, dialek, adat istiadat dan cita rasa yang beranekaragam. Pariwisata menjadi faktor penting dalam pengembangan ekonomi, karena kegiatannya mendorong perkembangan beberapa sektor ekonomi nasional misalnya:

1. Meningkatkan urbanisasi karena pertumbuhan dan pembaharuan fasilitas wisata. Hal ini meliputi pembangunan dan perbaikan prasarana dan subprasarana pariwisata.
2. Menggugah industri-industri baru yang berkaitan dengan jasa-jasa wisata.
3. Menambah permintaan akan hasil-hasil pertanian karena bertambahnya pemakaian
4. Memperluas pasar barang-barang lokal.
5. Menunjang pendapatan Negara dengan *valuta* asing sehingga mengurangi devisa didalam neraca pembayaran dan memajukan perekonomian nasional.
6. Memberi dampak positif pada tenaga kerja di Negara, karena pariwisata memperluas lapangan kerja baru

Daya tarik yang lain seperti kehidupan sehari-hari, pasar-pasar tradisional, cara bertani, memancing, perkebunan, memanjat tebing, arung jeram, terbang layang, berselancar, berlayar, festival, upacara adat dan lain-lain (Bagyono 2007:22).

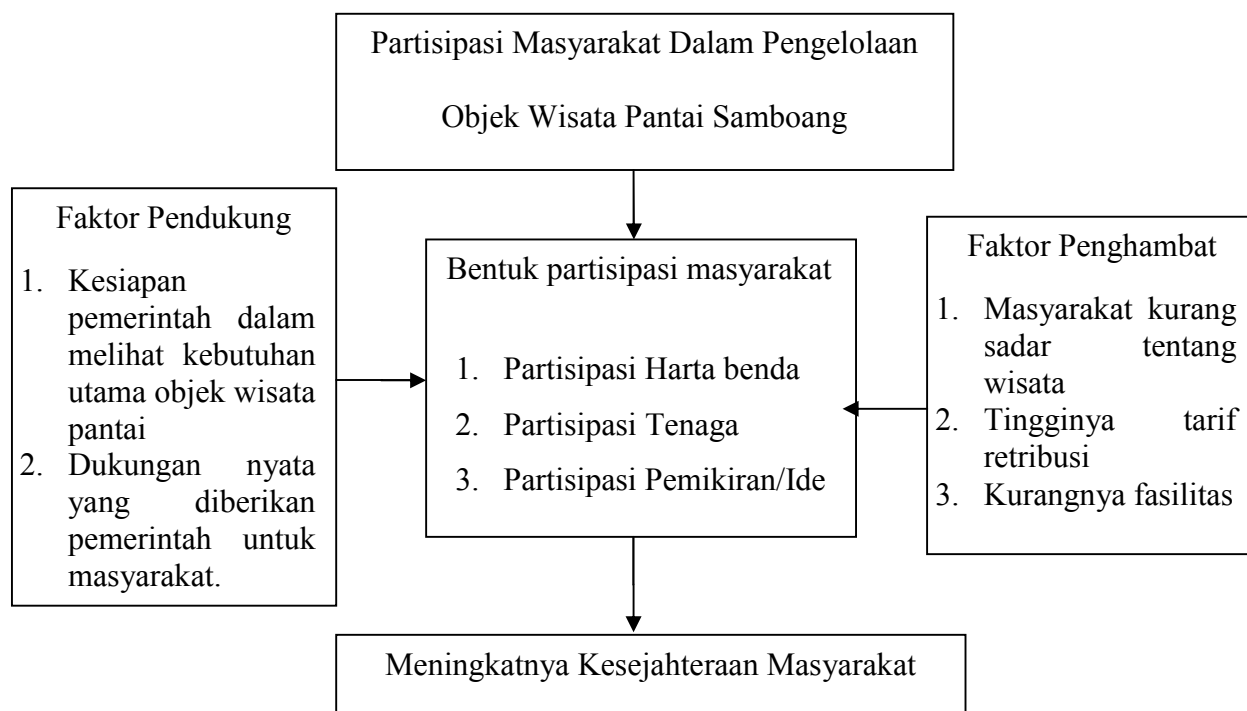
Nyoman S. Pendit (2003:33) menjelaskan tentang Kepariwisata juga dapat memberikan dorongan langsung terhadap kemajuan-kemajuan pembangunan atau perbaikan pelabuhan-pelabuhan (laut atau udara), jalan-jalan raya, pengangkutan setempat, program-program kebersihan atau kesehatan, pilot proyek, sarana budaya dan kelestarian lingkungan dan sebagainya. Yang kesemuanya dapat memberikan keuntungan dan kesenangan baik bagi masyarakat dalam lingkungan daerah wilayah yang bersangkutan maupun bagi wisatawan pengunjung dari luar. Kepariwisata juga dapat memberikan dorongan dan sumbangan terhadap pelaksanaan pembangunan proyek-proyek berbagai sektor bagi negara-negara yang telah berkembang atau maju ekonominya, dimana pada gilirannya industri pariwisata merupakan suatu kenyataan ditengah-tengah industri lainnya. Kawasan pariwisata merupakan kawasan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan pariwisata dengan kriteria pemanfaatan ruang :

1. Tersedia sarana dan prasarana;
2. Tersedia aksesibilitas yang tinggi ke pusat pelayanan niaga dan kesehatan;
3. Memiliki obyek dan daya tarik wisata;
4. Pemberlakuan lebar garis sepanjang pantai (Perda atau hukum perusahaan atau sistem pemilikan pantai);
5. Pengaturan pemakaian air tanah yang disesuaikan dengan kapasitas ketersediaan air tanah dan waktu yang dibutuhkan untuk pengisian kembali;
6. Lebar garis sepanjang pantai 100-300 meter dari titik pasang tertinggi.

#### **D. Kerangka Pikir**

Menghadirkan bisnis pariwisata di Kabupaten Bulukumba di tuntut adanya partisipasi masyarakat dalam rangka pembangunan dan pengelolaan wisata Pantai Samboang. Partisipasi masyarakat dalam mengelola wisata pantai berupa infrastruktur merupakan hal yang paling utama yang harus dilakukan oleh masyarakat setempat untuk memenuhi kenyamanan para pengunjung sebagai Destinasi Tujuan Wisata (DTW). Hamijono (2007: 21) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat terdiri dari partisipasi dalam bentuk uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi buah pikiran/ide dan partisipasi sosial. Namun penulis hanya fokus pada bentuk (a) partisipasi harta benda, (b) partisipasi tenaga dan (c) partisipasi pemikiran/ide, karena partisipasi uang, partisipasi keterampilan dan partisipasi social bukan menjadi fokus penelitian. Partisipasi yang dilakukan masyarakat setempat dalam pengelolaan wisata pantai bukan tanpa hambatan, namun terdapat faktor-faktor yang mendukung dan menghambat partisipasi pengelolaan wisata Pantai Samboang, yaitu faktor pendukungnya (a) kesiapan pemerintah dalam melihat kebutuhan utama objek wisata pantai, (b) dukungan nyata yang diberikan pemerintah untuk masyarakat. Faktor penghambatnya (a) masyarakat kurang sadar wisata yang menyebabkan kurang wisatawan yang berkunjung sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat, (b) tingginya tarif retribusi, (c) kurangnya fasilitas.

Kerangka pemikiran dari penelitian dapat di gambarkan dalam skema seperti dibawah ini.



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

### E. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata Pantai Samboang yaitu partisipasi masyarakat Kelurahan Eka Tiro Lingkungan Ere Lebu Timur dalam pengelolaan objek wisata pantai dalam bentuk (a) partisipasi harta benda, (b) partisipasi tenaga dan (c) partisipasi pemikiran/ide. Faktor pendukungnya (a) kesiapan pemerintah dalam melihat kebutuhan utama objek wisata pantai, (b) dukungan nyata yang diberikan pemerintah untuk masyarakat. Faktor penghambatnya (a) masyarakat kurang sadar tentang wisata (b) tingginya tarif retribusi, (c) kurangnya fasilitas.



## **F. Deskripsi Fokus Penelitian**

1. Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, (a) masyarakat menyumbangkan lahannya untuk pelebaran jalan (b) menghibahkan tanahnya sebagai fasilitas wisata (dalam pembangunan Villa).
2. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan masyarakat Lingkungan Ere Lebu Timur kelurahan Eka Tiro dalam bentuk (a) gotong royong dalam kebersihan (b) meramaikan acara kemerdekaan.
3. Partisipasi buah pikiran/ide adalah partisipasi masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya di Pantai Samboang dengan memberikan pendapat seperti (a) pembuatan kolam renang (b) event pemancingan tingkat provinsi
4. Kesiapan pemerintah dalam kebutuhan utama objek wisata pantai
5. Dukungan nyata yang diberikan pemerintah untuk masyarakat.
6. Masyarakat kurang sadar tentang wisata
7. Tingginya tarif retribusi,
8. Kurangnya fasilitas.
9. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dengan adanya pantai Samboang, hampir tidak ada nilai tambah dalam pendapatan karena kurangnya wisatawan yang berkunjung kepantai Samboang. Masyarakat Ere Lebu Timur Kelurahan Eka Tiro kecamatan Bonto Tiro belum sejahtera dengan adanya Pantai Samboang.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu Dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini telah dilaksanakan selama dua bulan terhitung mulai bulan Mei sampai dengan bulan Juli dan penelitian ini dilaksanakan di Lokasi Wisata Pantai Bahari Samboang Lingkungan Ere Lebu Timur Kelurahan Eka Tiro Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba dan Dinas Pariwisata Kota Bulukumba. Alasan penulis memilih lokasi ini dikarenakan di Pantai Samboang merupakan suatu tempat yang masih kurang dilirik oleh para wisatawan baik lokal, regional maupun mancanegara, fasilitas yang masih kurang dan tidak terawat serta banyaknya balapan liar.

#### **B. Jenis Dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif. Moleong (2007:5) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menguatkan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktik-praktik yang berlaku. Dalam metode deskriptif digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau bidang tertentu.

Menetapkan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang mendatang.

## 2. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologi. Karena berkaitan langsung dengan gejala-gejala yang muncul disekitar lingkungan manusia terorganisir dalam suatu permasalahan. Penelitian yang menggunakan pendekatan fenomenologis berusaha untuk memahami makna pariwisata serta interaksi pada orang-orang dalam situasi tertentu untuk mendekati perilaku orang dengan maksud menemukan fakta atau penyebab.

### **C. Sumber Data**

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara dengan pihak yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan penelitian.
2. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen dan literatur serta bahan-bahan tertulis baik dari dalam maupun dari luar yang berhubungan dengan pokok bahasan penelitian ini.

### **D. Informan Penelitian**

Pemilihan informan sebagai salah satu sumber data yang urgen terhadap penelitian dan harus menggunakan teknik yang tepat. Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposif yaitu sengaja memilih informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Sehingga data yang diperoleh lebih refresentatif dengan melakukan proses penelitian yang kompeten dibidangnya.

Alasan pemilihan informan adalah pantai Samboang telah dikelola oleh Dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Bulukumba dan lokasi pantai Samboang berada di Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba, tentunya pemerintah setempat dan masyarakatnya banyak mengetahui tentang pantai Samboang. Adapun informan dalam penelitian ini diambil dari beberapa unsur, seperti berikut ini :

Tabel 1. Daftar informan penelitian

No.	Nama	Inisial	Jabatan	Ket.
1.	Andi Rukmini, S.Sos	AR	Kasubag Destinasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba	1
2.	Baharuddin SP	BA	Kasi Pemerintahan Kec. Bontotiro	1
3.	Zaenal	ZA	Kepala Lingkungan Erelebu Barat Selaku Kadis Kelurahan Ekatiro	1
4.	Muhammad Rijal	MR	Kepala Lingkungan Erelebu Timur	1
5.	Andi Riuh DM	AR	Tokoh masyarakat (pakar)	1
6.	Muhammad Masdar	MM	Wisatawan	1
7.	Aspriyanti	AS	Wisatawan	1
8.	Rismawati	RI	Masyarakat	1
9.	Hartono Nasir	HN	Masyarakat	1
Jumlah				9 orang

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan para informan sebagai data primer dan tulisan atau dokumen-dokumen yang mendukung pernyataan informan dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan observasi, dapat dilihat dalam rincian berikut ini:

### 1. Wawancara

Wawancara pada hakekatnya adalah teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan bertatap muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti. Dengan demikian yang dimaksud metode wawancara dalam penelitian ini adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dialog langsung antara penulis dengan informan yang akan ditetapkan.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama beberapa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku, dokumen resmi maupun statistik yang berhubungan dengan masalah penelitian, teknik ini dilakukan dengan cara mengadakan penelaan terhadap bahan-bahan yang tertulis yang meliputi hasil-hasil seminar maupun laporan dari pemerintah kelurahan dan buku-buku serta majalah.

### 3. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis tentang gejala-gejala yang diamati. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi langsung (*direct observation*) dan sebagai peneliti yang menempatkan diri sebagai pengamat (*recognized outsider*) sehingga interaksi peneliti dengan subjek penelitian bersifat terbatas. Dengan melakukan observasi, penulis mencatat apa saja yang dilihat dan diamati dari dokumen tertulis untuk memberikan gambaran secara utuh tentang objek yang akan diteliti.

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengelolah data dimana data dapat diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisi interaktif. Dalam model ini terdapat komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:334)

1. Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang akan ditetapkan.
2. Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan peneliti dapat dilakukan.
3. Sajian data merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan kesimpulan secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis agar makna peristiwanya menjadi lebih mudah dipahami.
4. Penarikan kesimpulan, pada awal pengumpulan data peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dan hal-hal yang ditemui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggung jawabkan.

## **G. Keabsahan Data**

Teknik pengumpulan data Triangulasi diartikan sebagai teknik data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada.

Menurut Sugiyono (2012:370) ada tiga macam Triangulasi yaitu:

### **1. Triangulasi sumber**

Membandingkan dengan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya, membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara.

### **2. Triangulasi teknik**

Menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi.

### **3. Triangulasi waktu**

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Untuk itu dalam rangka menguji kredibilitas data, dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Objek Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Kabupaten Bulukumba**

Mitodologi penamaan “Bulukumba”, bersumber dari dua kata dalam bahasa bugis yaitu “Bulu’ku” dan “Mupa” yang dalam bahasa Indonesia berarti “masih gunung milik saya atau tetap gunung milik saya”. Mitos ini pertama kali muncul pada abad ke-17 Masehi ketika terjadi perang saudara antara dua kerajaan besar Sulawesi yaitu Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone. Di pesisir pantai yang bernama “Tana Kongkong”, di situlah utusan Raja Gowa dan Raja Bone bertemu, mereka berunding secara damai dan menetapkan batas wilayah pengaruh kerajaan masing-masing. Bangkeng Buki’ (secara harfiah berarti kaki bukit) yang merupakan barisan lereng bukit dari Gunung Lompo battang diklaim oleh pihak Kerajaan Gowa sebagai batas wilayah kekuasaannya mulai dari Kindang sampai ke wilayah bagian timur. Namun pihak Kerajaan Bone bersikeras mempertahankan Bangkeng Buki’ sebagai wilayah kekuasaannya mulai dari barat sampai ke selatan.

Berawal dari peristiwa tersebut kemudian tercetuslah kalimat dalam bahasa Bugis “Bulu’ku mupa” yang kemudian pada tingkatan dialek tertentu mengalami perubahan proses bunyi menjadi “Bulukumba”. sejak itulah nama Bulukumba mulai ada dan hingga saat ini resmi menjadi sebuah Kabupaten. Peresmian Bulukumba menjadi sebuah nama kabupaten dimulai dari terbitnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang pembentukan daerah-daerah



Tingkat II di Sulawesi yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 1978, tentang Lambang Daerah.

Akhirnya setelah dilakukan seminar sehari pada tanggal 28 Maret 1994 dengan narasumber Prof. Dr. H. Ahmad Mattulada (ahli sejarah dan budaya) maka ditetapkan hari jadi Kabupaten Bulukumba, yaitu tanggal 4 Februari 1960 melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1994. Secara yuridis formal Kabupaten Bulukumba resmi menjadi daerah tingkat II setelah ditetapkan Lambang Daerah Kabupaten Bulukumba oleh DPRD kabupaten Bulukumba pada tanggal 4 Februari 1960 dan selanjutnya dilakukan pelantikan Bupati pertama yaitu Andi Patarai tanggal 12 februari 1960.

## **2. Keadaan Geografis dan Keadaan Topografi Kabupaten Bulukumba**

Kabupaten Bulukumba terletak di bagian selatan dari jazirah Sulawesi Selatan dan berjarak 153 km dari Makassar (Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan). Luas wilayah Kabupaten Bulukumba 1.154,7 km<sup>2</sup> atau 2,5 % dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Bulukumba terdiri dari 10 kecamatan yaitu Kecamatan Ujung Bulu (Ibukota Kabupaten), Kecamatan Gantarang, Kecamatan Kindang, Kecamatan Rilau Ale, Kecamatan Bulukumpa, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bonto Bahari, Kecamatan Bonto Tiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang. Tiga Kecamatan sentral pengembangan pertanian dan perkebunan yaitu Kecamatan Kindang, Kecamatan Rilau Ale, dan Kecamatan Bulukumpa. Dua kecamatan juga merupakan sentral pariwisata yaitu kecamatan Bonto Bahari dan Kecamatan Bonto Tiro.

Secara geografis Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara 5° 20'' sampai 5° 40'' Lintang Selatan dan 119° 50'' sampai 120° 28'' Bujur Timur.

Batas-batas wilayah adalah :

- Sebelah Utara : Kabupaten Sinjai
- Sebelah Selatan : Laut Flores
- Sebelah Timur : Teluk Bone
- Sebelah Barat : Kabupaten Bantaeng

Daerah perbukitan di Kabupaten Bulukumba terbentang mulai dari Barat ke Utara dengan ketinggian 100 sampai dengan di atas 500 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari Kecamatan Kindang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale. Kabupaten Bulukumba mempunyai suhu rata-rata berkisar antara 23,82°C-27,68°C. Suhu pada kisaran ini sangat cocok untuk pertanian tanaman pangan dan tanaman perkebunan. Berdasarkan analisis Smith-Ferguson (tipe iklim diukur menurut bulan basah dan bulan kering) maka klarifikasi iklim di Kabupaten Bulukumba termasuk iklim lembab atau agak basah.

Sungai di Kabupaten Bulukumba ada 32 aliran yang terdiri dari sungai besar dan sungai kecil. Sungai-sungai ini mencapai panjang 603,50 km dan yang terpanjang adalah sungai sangkala yakni 65,30 km, sedangkan yang terpendek adalah sungai biroro yakni 1,50 km. Sungai-sungai ini mampu mengairi lahan sawah seluas 23,365 Ha. Kepadatan penduduk Kabupaten Bulukumba pada tahun 2009 yaitu rata-rata 340 jiwa per km<sup>2</sup>. Kecamatan Ujung bulu mempunyai kepadatan yang tinggi dikarenakan sebagai ibukota Kabupaten dan aktivitas yang

tinggi dengan jumlah penduduk yang besar dan luas daerah relatif kecil jika dibandingkan kecamatan lainnya.

Keadaan Topografi di Kabupaten Bulukumba sangat bervariasi dari 0- >1000 meter dari permukaan laut yang dapat dibagi kedalam 3 (tiga) satuan ruang morfologi. Daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 -25 Mdpl meliputi kecamatan Gantarang, Ujung Bulu, Ujung Loe, Bonto Bahari, Bonto Tiro, Kajang dan Kecamatan Herlang yang merupakan wilayah Pesisir. Untuk daerah bergelombang dengan ketinggian antara 25 – 100 Mdpl meliputi kecamatan Gantarang, Kindang, Bontobahari, Bontotiro, Kajang, Herlang, Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale. Sedang untuk daerah perbukitan dengan ketinggian 100 – diatas 500 Mdpl yang terbentang mulai dari barat ke utara yang meliputi Kecamatan Kindang, Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale.

Ditinjau dari kemiringan lereng mempunyai kemiringan antara 0 -15% dan >40%. Pada tingkat kemiringan > 40% Sangat potensial pengembangan lahan non urban, yaitu dapat difungsikan sebagai kawasan lindung. Sedangkan untuk daerah konservasi lahan di daerah ini terdapat beberapa lokasi kawasan hutan yang tersebar di 6 (enam) kecamatan dengan luas keseluruhan 8.453,25 Ha, tetapi di kecamatan tersebut masih terdapat beberapa lahan kritis yang sebagian besar terdapat di dua kecamatan yaitu Kecamatan Bonto Bahari dan Kecamatan Kindang. Wilayah Kabupaten Bulukumba berdasarkan kondisi topografinya, terdiri atas daerah pesisir dan dataran tinggi (pegunungan), dengan bentuk permukaan yang beragam (datar, bergelombang, berbukit hingga pegunungan). Secara umum ketinggian tempat dari permukaan laut (dpl) di Kabupaten

Bulukumba dibedakan kedalam 0-25 meter, 25-100 m, 100-500 m, 100-1.000 m dan 1.000 m keatas, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Ketinggian 0 – 25 Mdpl; relatif datar dan terdapat di sepanjang pantai Kecamatan Gantarang, Ujung Bulu, Ujung Loe dan Bonto Bahari.
- b. Segmentasi ketinggian 0-25 Mdpl berada di sepanjang pesisir pantai yang berbatasan dengan Teluk Bone, membentang daru Utara ke Selatan serta disepanjang pesisir pantai yang berbatasan dengan Laut Flores membentang arah Timur Barat
- c. Ketinggian 25 – 100 Mdpl; datar sampai bergelombang berada di sebagian Kecamatan Gantarang
- d. Ketinggian 100 – 500 Mdpl; bergelombang sampai berbukit, dijumpai di wilayah kecamatan Rilau Ale, sebagian Kecamatan Bulukumba dan Gantarang
- e. Ketinggian 500 – 1.000 Mdpl; berbukit sampai bergunung, dijumpai pada sebagian Kecamatan Bonto Tiro, Bulukumpa dan sebagian Kecamatan Kindang
- f. Ketinggian diatas 1.000 Mdpl: perbukitan dan pegunungan yang banyak dijumpai di Kecamatan Kindang dan Kecamatan Bulukumpa yang berbatasan dengan kabupaten Sinjai.

### **3. Keadaan Penduduk**

Kabupaten Bulukumba pada tahun 2014 memiliki jumlah penduduk mencapai 435.035 jiwa, yang berada di 10 (sepuluh) Kecamatan dengan kepadatan penduduk 376,76 orang per Km<sup>2</sup> dan ini berarti mengalami peningkatan

dari tahun sebelumnya yakni tahun 2013 dengan kepadatan penduduk 375,75 orang per Km<sup>2</sup>, selanjutnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Tabel 2. Penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Bulukumba tahun 2010 – 2014

No	Kecamatan	2010(jiwa)	2011(jiwa)	2012(jiwa)	2013(jiwa)	2014(jiwa)
1	Gantarang	71.158	71.741	72.183	77.276	78.468
2	Ujung Bulu	48.126	48.518	48.818	50.560	49.807
3	Ujung Loe	39.533	39.859	40.105	36.812	45.089
4	Bonto Bahari	23.976	24.180	24.329	28.294	28.173
5	Bonto Tiro	22.808	23.004	23.146	27.715	29.724
6	Herlang	24.128	24.332	24.482	31.531	29.724
7	Kajang	47.080	47.467	47.760	53.391	46.880
8	Bulukumpa	50.835	51.252	51.568	53.836	53.415
9	Rilau Ale	37.809	38.121	38.357	42.491	42.539
10	Kindang	29.815	30.057	30.242	31.967	31.850
Bulukumba		395.268	398.531	400.990	433.873	435.035

Sumber : *Profil Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2013, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba*

Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, pada tahun 2014 perbandingan jenis kelamin perempuan lebih banyak daripada jenis kelamin laki-laki, yakni 217.520 jiwa perempuan dibandingkan penduduk laki-laki yakni 217.515 jiwa. Rasio jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki yakni 100, berarti dalam 100 orang penduduk perempuan terdapat 100 orang.

#### **4. Kantor Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba**

Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) merupakan alat utama dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah karena berfungsi untuk menerjemahkan

berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan publik serta untuk menjamin pelaksanaan berbagai kebijakan tersebut secara operasional, terutama dalam memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, SKPD merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda Pemerintah Daerah, dalam rangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

SKPD Dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Bulukumba adalah satuan kerja yang memiliki kewenangan menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata secara efektif, efisien, akuntabel dan professional. Seperti yang diamanatkan Peraturan Bupati Bulukumba No. 32/IX /2008 tentang tugas pokok, uraian tugas jabatan Struktural dan uraian kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Bulukumba. Dalam melaksanakan tugas pokok diatas dinas kebudayaan dan pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### **5. Visi dan Misi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata.**

Visi adalah pandangan ide kedepan yang ingin di wujudkan dalam kurung waktu tertentu untuk mendukung pelaksanaan kewenangan otonomi daerah

bidang kebudayaan dan pariwisata sebagai antisipasi pengembangan lingkungan strategis dan era globalisasi. Dengan memperhatikan Visi Bupati dan wakil Bupati terpilih tahun 2011-2015 serta tantangan pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan kedepan, visi dirumuskan sebagai berikut:

***Menggapai masyarakat sejahtera melalui pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan (Tourism and culture development for prosperity) dengan berlandaskan pada nilai religi dan nilai budaya***

Visi ini mengandung arti sebagai berikut :

1. Kebudayaan dan Kepariwisataan merupakan salah satu sektor andalan kebudayaan Kabupaten Bulukumba yang perlu mendapatkan prioritas yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) maupun pendapatan masyarakat.
2. Sebagai upaya pengembangan pariwisata dengan objek sasaran pada pemamfaatan sumber daya alam, pelestarian nilai-nilai budaya sebagai daya tarik wisata.
3. Sebagai perwujudan daerah tujuan wisata andalan Sulawesi-Selatan, maka sektor pariwisata dan kebudayaan menjadi salah satu bidang andalan untuk menopang peningkatan perekonomian untuk menggapai masyarakat yang sejahtera.
4. Nilai religi dan nilai budaya menjadi landasan kokoh dalam pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan yang akuntabel dan transparan.

Misi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Sejalan dengan upaya pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi objektif. Maka Visi Pembangunan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba adalah :

- a. Melestarikan keragaman dan kekayaan budaya serta daerah serta kesenian daerah (*art culture conservation*) sebagai salah satu identitas leluhur
- b. Mengembangkan destinasi pariwisata potensial (*tourism destination development*) yang berkelanjutan dan terencana
- c. Menerapkan suatu sistem pemasaran yang inovatif dan bertanggung jawab (*innovative and responsible marketing*)
- d. Mengembangkan industry pariwisata dan budaya untuk meningkatkan ekonomi daerah.
- e. Mengembangkan kapasitas sumber daya kebudayaan dan kepariwisataan
- f. Menciptakan tata kelembagaan yang akuntabel, transparan dan responsif.

Adapun misi pariwisata Indonesia adalah:

1. Peningkatan devisa
2. Peningkatan kesempatan kerja dan usaha
3. Pemberdayaan ekonomi rakyat
4. Pelestarian nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat dalam rangka pembangunan jati diri bangsa



5. Pelestarian fungsi mutu lingkungan hidup
6. Perwujudan otonomi daerah sektor pariwisata

#### **6. Struktur organisasi dinas kebudayaan dan pariwisata**

Adapun susunan personalia Dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Bulukumba dapat dilihat dari struktur organisasi dibawah ini ;

- a. Kepala dinas
- b. Sekertaris
  1. Sub bagian program
  2. Sub bagian keuangan
  3. Sub bagian umum dan kepegawaian
- c. Bidang kebudayaan
  1. Seksi sejarah dan purbakala
  2. Seksi museum, monumen dan galeri
  3. Seksi pengembangan budaya dan kesenian
- d. Bidang pengembangan usaha Pariwisata
  1. Seksi objek wisata
  2. Seksi pengembangan SDM
  3. Seksi sarana pariwisata
- e. Bidang pemasaran dan promosi
  1. Seksi promosi
  2. Seksi pembinaan Event dan daya tarik wisata
  3. Seksi pengembangan dan kerja sama pemasaran

## 7. Sumber Daya SKPD

### a. Pegawai

Tabel 3. Jumlah dan presentase pegawai berdasarkan pendidikan penjenjangan.

No.	Pendidikan penjenjangan	Jumlah (orang)	Presentasi (%)
1.	Diklatpim II	1	0,00
2.	Diklatpim III	2	4,88
3.	Diklatpim III	13	31,71
4.	Non-Diklatpim	26	63,41
Jumlah		41	100

### b. Pangkat/golongan

Tabel 4. Jumlah dan presentase berdasarkan jenjang kepangkatan

No.	Pangkat / golongan	Jumlah (orang)	Presentase (%)
Golongan IV		4	9,76
1	Golongan IV/c	1	
2	Golongan IV/b	1	
3	Golongan IV/a	2	
Golongan III		25	60,98
1	Golongan III/d	4	
2	Golongan III/c	8	
3	Golongan III/b	5	
4	Golongan III/a	8	
Golongan II		10	24,39
1	Golongan II/d	0	
2	Golongan II/c	3	
3	Golongan II/b	4	
4	Golongan II/a	3	
Golongan I		2	4,88
1	Golongan I/d	-	
2	Golongan I/c	-	
3	Golongan I/b	2	
4	Golongan I/a	-	
Jumlah		41	

## **8. Gambaran Umum Kecamatan Bonto Tiro**

Kecamatan Bontotiro adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupten Bulukumba timur, dengan luas wilayah 78,34 km<sup>2</sup>. Secara geografis Kecamatan Bonto Tiro mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Herlang
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bonto Bahari
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bonto Bahari dan Kecamatan Ujung Loe
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone

Kecamatan Bonto Tiro terdiri dari 1 kelurahan dan 12 desa, dimana pusat pemerintahan berada di Lingkungan Hila-hila Kelurahan Ekatiro dengan jarak dari Ibu Kota Kabupaten (Bulukumba) sekitar 39 Km, untuk mencapai daerah ini cukup dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat dengan waktu tempuh sekitar 30 menit. Keadaan Topografi di Kecamatan Bontotiro bervariasi yakni terdapat daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 s/d 25 Mdpl yang meliputi daerah pesisir Kecamatan Bonto Tiro, selain itu juga terdapat daerah bergelombang dengan ketinggian antara 25 s/d 100 Mdpl, dengan jumlah penduduk 21916 jiwa.

Kecamatan Bonto Tiro sekarang terdiri atas 12 kelurahan/desa, yaitu;

1. Kelurahan/Desa Batang
2. Kelurahan/Desa Bonto Barua
3. Kelurahan/Desa Bonto Bulaeng
4. Kelurahan/Desa Bonto Marannu

5. Kelurahan/Desa Bonto Tangnga
6. Kelurahan/Desa Buhung Bundang
7. Kelurahan/Desa Caramming
8. Kelurahan/Desa DwiTiro
9. Kelurahan/Desa Ekatiro
10. Kelurahan/DesaPaku Balaho
11. Kelurahan/Desa Tamalanrea
12. Kelurahan/Desa Tritiro

Adapun data pengunjung pantai Samboang antara lain sebagai berikut:

Tabel 5. Data pengunjung Pantai Samboang tahun 2014-2016

No.	Tahun	Pengunjung		Total
		Lokal	Regional	
1.	2014	3891	311	4202
2.	2015	4304	385	4688
3.	2016	4622	442	5064
Jumlah		12817	1138	13954

Sumber: Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bulukumba

Berdasarkan data diatas menyatakan bahwa wisatawan setiap tahunnya sangat sedikit yang berkunjung, dibandingkan dengan pengunjung yang datang di Pantai Bira sehingga kesejahteraan masyarakatnya tidak meningkat. Melihat data diatas maka ini adalah tugas pemerintah untuk tetap mempromosikan pantai Samboang agar banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik wisatawan lokal, regional, maupun mancanegara sehingga pendapatan atau penghasilan masyarakat bisa meningkat dan sejahtera seperti masyarakat lainnya yang daerah mukimnya ada lokasi pantai, seperti pantai Bira dan pantai Apparalang

## **B. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Samboang Di Kelurahan Eka Tiro Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba**

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata Pantai Samboang dimana masyarakat memberikan sesuatu yang berupa sumbangan kepada keberhasilan objek wisata untuk mencapai tujuan kelompok yang dibentuk agar dalam pengelolaan objek wisata menjadi lebih baik, berkembang dan tentunya banyak wisatawan yang berkunjung. Keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan objek wisata Pantai Samboang merupakan keterlibatan yang sangat diharapkan oleh pemerintah pada khususnya karena mereka adalah tonggak kemajuan dari apa yang diharapkan oleh pemerintah atas perkembangan objek wisata Pantai Samboang untuk menjadi terkenal dan dapat diketahui oleh para wisatawan-wisatawan diseluruh sisi pengetahuan. Sehingga bisa mensejahterakan sedikit demi sedikit masyarakat setempat pada khususnya dan masyarakat di Kabupaten Bulukumba pada umumnya. Dengan ini peneliti ingin melihat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata pantai Samboang di Kabupaten Bulukumba dalam bentuk (a) partisipasi harta benda, (b) partisipasi tenaga dan (c) partisipasi buah pikiran/ide, seperti berikut ini:

### **1. Partisipasi masyarakat dalam bentuk Harta benda**

Partisipasi masyarakat di Kelurahan Ere Lebu Timur pantai Samboang dalam bentuk harta benda dapat dilihat dengan (a) masyarakat menyumbangkan lahannya untuk pelebaran jalan (b) menghibahkan tanahnya sebagai fasilitas wisata (dalam pembangunan Villa).

### **1.a Masyarakat menyumbangkan lahannya untuk pelebaran jalan**

Kesediaan masyarakat dalam menyumbangkan harta dan uangnya dalam hal pembangunan membuat salah satu warga juga menyumbangkan hartanya dalam hal ini tanah untuk dibuat jalan alternatif secara swadaya, sehingga memudahkan para wisatawan untuk akses jalan dari Pantai Ujung ke Pantai Samboang. Ini adalah tanda bahwa masyarakat sangat antusias dalam pengelolaan objek wisata pantai tersebut. Kesesuaian dalam pembangunan ini memberikan indikasi atau pertanda bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata Pantai Samboang dalam bentuk harta sebagai suatu bagian yang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang menunjukkan bahwa pembangunan dan pengelolaan membutuhkan dana yang cukup besar. Namun berdasarkan pandangan BA selaku wakil dari Camat Bonto Tiro dalam hal ini Kasi Pemerintahan bahwa:

“Tidak ada partisipasi uang disana dari masyarakat setempat akan tetapi sebagian dari mereka menyumbangkan tanah dan lahan mereka untuk fasilitas Pantai seperti pelebaran jalan” (hasil wawancara ,19 juli 2017 )

Masyarakat hanya menyumbangkan hartanya untuk pelebaran jalan dan pembuatan jalan alternative menuju pantai Tanjung Tiro, seperti yang diungkapkan oleh informan yang sama dalam hal ini ZA bahwa:

“Berdasarkan fakta, saya sendiri memiliki tanah disana, kami membuat jalan alternatif yang kita buat secara swadaya oleh masyarakat, tidak ada dana dari pemerintah sepeser pun, kita sendiri yang mengumpulkan dana untuk menimbun itu jalan supaya akses jalan dari pantai pasir putih samboang ke pantai ujung bisa dilalui dengan kendaraan roda dua” (hasil wawancara, 19 juli 2017).

Kesediaan masyarakat dalam menyumbangkan harta bendanya untuk pelebaran jalan, untuk kegiatan-kegiatan pembangunan terutama dalam hal pembuatan akses jalan alternatif bagi para wisatawan yang datang berkunjung, dan masyarakat dalam memberikan sumbangan bukan karena adanya paksaan dari pemerintah atau dari pihak lain, akan tetapi adanya kesadaran untuk membangun daerahnya. Seperti yang diungkapkan oleh MR selaku kepala lingkungan Ere Lebu Timur bahwa:

“Ya, masyarakat menyumbangkan sedikit lahannya untuk pelebaran jalan apalagi untuk pelebaran jalan 2 jalur yang menuju pantai kurang lebih 1 Meter, belum lagi untuk pembuatan gedung pertemuan aula Samboang, memang pemerintah membeli tanah masyarakat akan tetapi bukan harga jualnya” (hasil wawancara, 21 juli 2017)

Meskipun sumbangsi masyarakat tersebut terbilang belum mampu menutupi kekurangan-kekurangan yang ada di lokasi dan tidak cukup besar, karena partisipasi atau sumbangan yang diberikan masyarakat dalam bentuk harta berdasarkan keadaan ekonomi masyarakat itu sendiri, namun setidaknya masyarakat masih memiliki kesadaran dan rasa bangga dalam berpartisipasi untuk keindahan alam daerah mereka terutama objek wisata Samboang yang menjadi salah satu *icon* Daerah Bonto Tiro. Seperti yang diungkapkan oleh RI sebagai masyarakat bahwa:

“Ada beberapa masyarakat yang menyumbangkan lahannya untuk pelebaran jalan supaya jalan tidak terlalu sempit sehingga bagus untuk dilalui mobil, dan ada jalan alternatif yang di buat masyarakat menuju pantai Ujung Tiro yang biasa ada yang memancing ikan disana” (hasil wawancara, 25 juli 2017)

Kesadaran masyarakat untuk berkontribusi dalam menyumbangkan lahannya sebagai pelebaran jalan banyak disaksikan oleh masyarakat lain, hal ini

membuktikan bahwa masyarakat menginginkan yang terbaik untuk perkembangan dan kemajuan pantai Samboang. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti masak dapat disimpulkan bahwa masyarakat menyumbangkan sebagian kecil lahannya untuk pelebaran jalan sehingga akses menuju pantai Samboang tidak sempit dan mudah dilalui oleh kendaraan roda dua, roda empat dan sebagainya.

### **1.b Menghibahkan tanahnya sebagai fasilitas wisata (dalam pembangunan Villa).**

Terkait dengan upaya menggerakkan program pembangunan, dana merupakan salah satu penggerak utama yang menentukan dalam menyelenggarakan pembangunan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pembangunan tanpa didorong oleh dana yang memadai prosesnya akan pincang dan hal ini merupakan fenomena umum yang dialami setiap daerah tak terkecuali Kelurahan Eka Tiro Kecamatan Bonto Tiro. Dan yang terjadi di lapangan adalah minimnya masyarakat dalam menyumbangkan uangnya akan tetapi hanya harta semata untuk dijadikan fasilitas pariwisata seperti yang di katakan oleh AR sebagai berikut

“Kayaknya tidak ada, dan untuk partisipasi uang, masyarakat tidak memiliki tanggung jawab karena untuk masalah uang itu di tanggung oleh pemerintah dalam hal ini menganggarkannya, mereka belum ada partisipasi uang, mungkin ada tapi tidak di ketahui oleh pemerintah, paling tidak sebagian dari mereka hanya membuat penginapan semata tapi diatas tanah mereka sendiri karena ketika kita mau membangun disana kita harus membeli tanah dari masyarakat setempat hal ini terbukti ketika kami akan membangun aula pertemuan dan gedung samboang tadi, tanah ini dibeli sekitar 1 Ha dari masyarakat”. (hasil wawancara, 17 juli 2017).



Masyarakat setempat antusias membangun vila untuk penginapan yang sumber dananya berasal dari swadaya masyarakat sehingga fasilitas wisata bertambah seperti yang dikemukakan oleh ZA selaku wakil dari Lurah Eka Tiro dalam hal ini kepala Lingkungan Ere Lebu Barat bahwa:

“Banyak sebenarnya partisipasinya masyarakat disana antara lain pada masyarakat yang notabeneanya memiliki ekonomi yang bagus, dia justru membangun vila-vila untuk penginapan, dengan harapan dengan dibangunnya vila tersebut wisatawan lokal dan mancanegara akan tertarik datang kesana untuk berwisata dan masih banyak lagi” (hasil wawancara, 19 juli 2017)

Ekonomi adalah yang paling menunjang masyarakat dalam melakukan partisipasi harta. Oleh karena itu masyarakat sadar akan pentingnya pembangunan, karena tanpa adanya swadaya dari masyarakat dan hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah setempat maka pembangunan akan jalan ditempat, Seperti yang diungkapkan oleh MR selaku kepala lingkungan Ere Lebu Timur, bahwa:

“Masyarakat ada yang menghibahkan tanahnya untuk pembuatan vila tentunya bagi hasil, ada juga yang menjual ke pemerintah dengan harga yang agak murah sehingga bisa meringankan pemerintah untuk membuat fasilitas pantai seperti vila, ada juga yang membangun vila atas namanya sendiri dengan harapan banyak yang bisa berkunjung dan menginap” (hasil wawancara, 21 juli 2017)

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata pantai Samboang dalam bentuk harta, masyarakat dengan ikhlas menyumbangkan lahannya untuk fasilitas pantai serta tentunya harapan masyarakat bahwa kesejahteraannya bisa meningkat. Senada dengan yang diungkapkan oleh AR selaku tokoh masyarakat (pakar) bahwa:

“Masyarakat menyumbangkan lahannya sebagai fasilitas wisata karena mereka sadar ketika fasilitas pantai memadai tentunya wisatawan akan betah untuk berwisata”(hasil wawancara, 21 juli 2017)

Tingkat partisipasi masyarakat dalam bentuk harta sangat besar karena masyarakat dengan ikhlas menyumbangkan sedikit lahannya untuk fasilitas pantai. Berdasarkan hasil wawancara, penulis dapat menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata Pantai Samboang dalam bentuk harta, swadaya masyarakat dengan menyumbangkan hartanya, partisipasi harta jelas adanya karena sebagian dari mereka menyumbangkan tanahnya untuk pembuatan jalan menuju pantai Samboang dan membangun vila sebagai fasilitas pantai. Dalam hal ini masyarakat menginginkan perkembangan yang signifikan untuk Pantai Samboang sehingga masyarakat menyumbangkan harta bahkan uang mereka untuk pengelolaan objek wisata pantai Samboang. Masyarakat tidak hanya menyumbangkan hartanya dalam hal ini lahannya sebagai sarana dan prasarana wisata akan tetapi masyarakat mengharapkan kesejahteraannya bisa meningkat.

## **2. Partisipasi Masyarakat Dalam Bentuk Tenaga**

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang merupakan wujud dari rasa tanggung jawab adalah adanya sikap yang mendukung terhadap proses pembangunan antara lain ditunjukkan melalui partisipasi aktif tenaga dan keterampilan. Sebagaimana diketahui dalam suatu masyarakat tidak semua berpartisipasi secara penuh, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kemampuan, perbedaan antara anggota masyarakat yang satu dan masyarakat yang lain. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan masyarakat

Lingkungan Ere Lebu Timur kelurahan Eka Tiro dalam bentuk (a) gotong royong dalam kebersihan (b) meramaikan acara kemerdekaan

### **2.a Gotong royong dalam kebersihan**

Partisipasi tenaga yang dimaksud disini adalah bagaimana masyarakat terlibat secara langsung atau aktif dalam pelaksanaan pengelolaan objek wisata pantai. Menurut hasil observasi dan wawancara peneliti, kerja bakti atau gotong royong biasa dilaksanakan di Pantai Samboang. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan masyarakat setempat adalah membersihkan sampah-sampah kiriman yang berserakan diarea Pantai Samboang, perbaikan jalan, membersihkan sarana dan prasarana yang ada di area Pantai Samboang, serta kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan partisipasi langsung masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh RA selaku pihak dari Dinas Pariwisata bahwa :

“Partisipasi dalam bentuk tenaga itu ada, kita disana ada tenaga kebersihan dan penggajiannya dari Dinas Pariwisata yang disebut Tenaga Objek, kadang juga masyarakat setempat yang kerja bakti dan bergotong royong untuk membersihkan pantai, karena banyak sampah kiriman, petugas biasanya membersihkan jam 7 sampai jam 9, tunggu sampai jam 10 keatas banyak sampah kiriman yang datang, jadi petugas kebersihan kewalahan dalam membersihkan pantai, sehingga biasanya masyarakat setempat yang berinisiatif untuk kerja bakti. Petugas kebersihan disana itu ada 6 orang bersama dengan koordinatornya, dan pada dasarnya kebersihan Pantai Samboang juga menjadi tanggung jawab masyarakat setempat juga” (hasil wawancara, 17 juli 2017)

Semua aspek masyarakat turut bertanggung jawab atas Pantai Samboang ini terutama dalam hal kebersihan, karena kebersihan merupakan kunci dari keindahan sebuah objek wisata dan merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan ketika berkunjung, hal diatas senada dengan yang di ungkapkan oleh

BA selaku Camat Bonto Tiro dalam hal ini diwakilkan oleh Kasi Pemerintahan yaitu:

“Partisipasi masyarakat setempat dalam bentuk tenaga salah satunya adalah gotong royong membersihkan pantai” (hasil wawancara, 19 juli 2017)

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata Pantai Samboang dalam bentuk tenaga dengan bersama-sama masyarakat dengan pemerintah dalam memperindah pantai, dengan cara gotong royong, sehingga banyak wisatawan yang berkunjung. Senada dengan yang diungkapkan oleh MR selaku Kepala Lingkungan Ere Lebu Timur tentang partisipasi tenaga ini adalah sebagai berikut:

“Ada, partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga itu ada kadang kita mengadakan kerja bakti dan aksi bersih di bibir pantai tujuannya tidak lain untuk keindahan pantai tersebut” (hasil wawancara, 21 juli 2017)

Tidak bisa dipungkiri bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam hal membangun ketertinggalan Pantai Samboang dengan pantai-pantai lain adalah sangat besar, dalam hal ini masyarakat juga peduli dalam hal kebersihan lingkungan area Pantai Samboang. Masyarakat juga sadar ketika Pantai Samboang bersih pasti wisatawan akan senang dan tenang ketika berkunjung ketempat ini. Seperti yang diungkapkan oleh HN selaku masyarakat, bahwa:

“Kami sebagai masyarakat ketika pemerintah mengintruksikan bahwa akan diadakan aksi bersih pantai, maka kami siap-siap untuk ke pantai membersihkan setiap satu keluarga itu harus ada perwakilannya minimal satu orang untuk ikut membersihkan pantai dan sebenarnya sampah ini bukanlah dari masyarakat akn tetapi sampah kiriman yang dibawa oleh ombak, petugas kebersihan ada, akan tetapi ini merupakan tradisi yang tidak bisa dilepaskan begitu saja”(hasil wawancara, 06 februari 2018)

Partisipasi masyarakat untuk melaksanakan aksi bersih pantai sangat besar dan antusias karena masyarakat diharuskan untuk ikut bergotong royong dalam

setiap satu kepala keluarga satu orang yang mewakilkan. Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga/fisik yang sifatnya gotong royong merupakan suatu tradisi yang sudah turun temurun bagi masyarakat Kelurahan Eka Tiro Kecamatan Bonto Tiro dan kebersamaan mereka dalam membangun daerahnya.

### **2.b Meramaikan acara kemerdekaan**

Partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga salah satunya adalah meramaikan hari-hari besar seperti acaran 17 agustus-an, sehingga terekspostnya pantai Samboang menjadi mudah diketahui oleh wisatawan-wisatawan lain, Harapan masyarakat terhadap keberhasilan pengelolaan objek wisata Pantai Samboang cukup tinggi, namun perlu disadari bahwa berpartisipasi dalam pengelolaan objek wisata Pantai diperlukan kerja keras dari masyarakat dan pemerintah sendiri yang dalam hal ini kedua element keberhasilan sebuah objek wisata adalah dengan kerja sama dan didukung oleh hal-hal lain. Berdasarkan uraian hasil observasi dan wawancara diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dukungan pemerintah atas objek wisata Pantai Samboang itu cukup besar, akan tetapi banyak kendala yang terjadi, terutama dalam hal kesejahteraan masyarakatnya. Dan setiap dukungan pemerintah juga di *support* dan disambut langsung oleh masyarakat setempat demi sebuah tujuan yang telah ditargetkan. senada yang dikemukakan BA selaku wakil dari Camat Bonto Tiro dalam hal ini Kasi Pemerintahan bahwa,

“Kalau partisipasi masyarakat itu bagus, kenapa saya bilang bagus karena ada biasa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di pantai seperti acara dan hari-hari kemerdekaan, sekaligus memotivasi masyarakat untuk berwisata

di Pantai Samboang, hanya saja fasilitas-fasilitas pemerintahan terbatas sehingga objek wisata tersebut kurang diminati oleh wisatawan”. (hasil wawancara, 19 juli 2017).

Masyarakat pada dasarnya memiliki partisipasi nyata dalam pengelolaan objek wisata Pantai Samboang dalam hal ini ikut serta dalam setiap kegiatan kegiatan yang berlangsung dengan meramaikannya. Masyarakat setempat juga sangat berambisi untuk memperkenalkan objek wisata pantai ini melalui kegiatan-kegiatan yang halau oleh pemerintah. Seperti yang diungkapkan oleh HN sebagai masyarakat bahwa:

“Partisipasi kami sebagai masyarakat disini salah satunya adalah meramaikan kegiatan-kegiatan hari kemerdekaan biasanya ikut main bola *volley*, dan *games* lainnya yang diadakan oleh pak camat bersama jajarannya, seperti kebanyakan kegiatan, pak Bupati menghadiri acara ini sebagai wujud kepeduliannya terhadap pariwisata yang masih digadag perkembangannya, sekaligus menjadi alat untuk mempromosikan pantai Samboang” (hasil wawancara, 06 februari 2018)

Wujud kebanggaan masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat kecamatan Bonto Tiro pada khususnya, masyarakat dan pemerintah saling bekerjasama dalam perayaan hari kemerdekaan untuk mempererat silaturahmi, baik antar masyarakat itu sendiri maupun masyarakat dan pemerintahnya. Sehingga masyarakat antusias meramaikan acara-acara kemerdekaan agar kiranya pantai Samboang ini bisa terekspos dengan baik dan banyak wisatawan yang berkunjung karena akan meningkatkan taraf hidup masyarakat itu sendiri, seperti yang diungkapkan oleh AR selaku tokoh masyarakat bahwa:

“Saat 17 agustus biasanya ada kegiatan yang dilaksanakan di pantai Samboang, jadi pemerintah setempat mengadakan rapat bersama masyarakat dan membahas kegiatan ini, sehingga kegiatan ini berlangsung dengan baik seperti, permainan bola *volley*, lomba berenang dan lomba-lomba lainnya, jadi pesertanya itu masyarakat dan tim

penilainya dari kecamatan dan kelurahan” (hasil wawancara, 21 juli 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata pantai Samboang terutama dalam bentuk tenaga dengan hadir meramaikan hari-hari besar kemerdekaan, dengan begitu banyak informasi yang mampu disebar bahwa pantai Samboang juga tidak kalah indah dengan pantai-pantai yang lain, agar pantai Samboang tidak hanya sekedar menjadi pelarian bagi wisatawan ketika pantai yang lain penuh koutanya seperti pantai Bira.

### **3. Partisipasi masyarakat dalam bentuk buah pikiran/ ide**

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata pantai Samboang dalam bentuk buah pikiran/ide, Partisipasi dalam tahap ini menyangkut perencanaan program pengelolaan objek wisata Pantai Samboang, apa yang akan dilaksanakan masyarakat yang terkait dengan kebutuhan utama wisatawan. Pada tahap ini masyarakat diminta untuk menyampaikan pendapat, pemikiran dan saran terhadap rencana-rencana program pembangunan di wilayahnya. Maksud partisipasi pada tahap ini yaitu agar masyarakat secara bersama-sama berdiskusi untuk dapat menyampaikan kebutuhan utama di lingkungannya. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah kesediaan untuk membantu kelancaran partisipasi ini sesuai dengan kemampuan yang dimiliki setiap orang tanpa melihat partisipasi apa yang telah mereka berikan, yaitu (a) Rencana pembuatan kolam renang di dalam pantai, (b) Akan diadakan event pemancingan tingkat provinsi. Dengan demikian dapat dilihat di bawah ini:

### **3.a Rencana pembuatan kolam renang di dalam pantai**

Membangun sebuah kesuksesan wisata masyarakat banyak dibutuhkan partisipasi pemikiran/ ide, dalam hal ini untuk mengembangkan objek wisata pantai tersebut. Dengan adanya ide dan pemikiran dari masyarakat maka objek wisata pantai ini bisa berkembang dengan baik seperti yang dikemukakan oleh BA selaku Camat Bonto Tiro yang mewakili selaku Kasi Pemerintahan, bahwa:

“Partisipasi masyarakat dalam bentuk pemikiran /ide, masyarakat setempat ingin dan sangat mau mengembangkan agar supaya objek wisata tersebut bisa berkembang dan banyak diketahui oleh wisatawan-wisatawan ” (hasil wawancara,19 juli 2107)`

Partisipasi masyarakat dalam bentuk partisipasi ide/pemikiran pada dasarnya dengan wacana lisan ataupun tulisan, semua sangat mengharapkan Pantai Samboang ini menjadi objek wisata yang banyak dikenal, diketahui dan banyak dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan lokal maupun mancanegara, seperti yang dikemukakan oleh AR selaku pihak dari Dinas Pariwisata, bahwa :

“Ide-ide dari masyarakat itu banyak seperti pembuatan kolam renang didalam laut, ide itu ditanggapi tapi kembali lagi kita harus taat administrasi karena harus ada izin dari Kementerian Kelautan, bahwasanya kita tidak boleh membuat kolam renang didalam laut karena bisa merusak ekosistem laut. Menurut saya, masyarakat setempat maunya Pantai Samboang itu harus indah, harus rapi, harus bersih, harus bagaimana tapi kita dari Pemda belum tentu bisa merubah seketika itu semua, semuanya butuh waktu. Masyarakat setempat tidak bisa membangun sembarangan karena sudah ada master plannnya masing-masing ketika ada master plan semua sudah ditata dan diatur dari Pemda” (hasil wawancara, 17 juli 2017)

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata Pantai Samboang dalam bentuk ide/pemikiran adalah masyarakat setempat menginginkan



pemerintah untuk membangun sebuah kolam renang didalam Pantai Samboang, tujuannya untuk menjadikan kolam renang ini sebagai daya tarik khusus bagi wisatawan untuk berkunjung di Pantai Samboang, tapi masyarakat setempat tidak memiliki daya dan upaya disamping merusak ekosistem laut juga semua itu membutuhkan perizinan dari Dinas Kelautan Kabupaten. Pemerintah setempat dalam hal ini Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata telah mengupayakan hal tersebut tapi semua butuh proses panjang. Sedikit banyaknya masyarakat setempat telah mengeluarkan ide-ide cemerlang mereka akan tetapi masih banyak kendala dari pihak yang berwajib yang menangani hal ini. Seperti yang diungkapkan oleh HN selaku masyarakat, bahwa:

“Kolam renang didalam pantai memang menarik perhatian parawisatawan akan tetapi ini tidak berlangsung lama karena bisa merusak ekosistem laut, apalagi ketika ombak besar maka kolamnya pasti akan rusak juga, jadi saling merugikan kecuali ketika kolam itu dibuat agak jauh dari pantai maka itu akan menjadi daya tarik tersendiri dari wisatawan yang berkunjung, apalagi sudah ada wadah pemancingan, akan tambah menarik minat wisatawan untuk berkunjung” (hasil wawancara, 06 februari) 2017)

Berdasarkan *master plan* yang telah dibuat oleh pihak yang berwenang bahwa masyarakat setempat maupun pemerintah setempat sendiri tidak bisa asal membangun apapun, karena telah ditata dan diatur oleh *master plan* Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bulukumba. Oleh karena itu respon sebagian masyarakat sangat tidak memungkinkan membuat kolam renang didalam pantai. Seperti yang disampaikan AR sebagai tokoh masyarakat, bahwa:

“wisatawan itu tertarik datang kesini ketika sebuah pantai itu memiliki nilai dan memiliki daya tarik, rencana pembuatan kolam pernah ada, tapi harus ada izin dari Dinas Kelautan, tapi sampai sekarang belum terlaksana karena susah mendapatkan izin dari Dinas tersebut, katanya bisa merusak

ekosistem laut jika ada material yang mengganggu apalagi pantai ini kaya akan ekosistem lautnya” (hasil wawancara, 21 juli 2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa ketika pantai Samboang memiliki kolam renang didalam pantai maka akan menarik wisatawan untuk berwisata, untuk mendapatkan hasil harus mendapatkan izin dari Dinas Kelautan, karena ini beresiko merusak ekosistem laut.

### **3.b Akan diadakan event pemancingan tingkat provinsi**

Partisipasi masyarakat dalam bentuk ide/pemikiran lainnya adalah pembuatan event pemancingan tingkat provinsi juga menjadi partisipasi pemikiran dan ide nyata untuk turut mengembangkan objek wisata Pantai di Samboang. Hal ini masyarakat sangat peduli dengan perkembangan dan pembangunan objek wisata Pantai Samboang. Oleh sebab itu partisipasi masyarakat dalam bentuk ide/pemikiran ini sangat mendasar sekali terutama tahap perencanaan dan pengambilan keputusan, karena keikutsertaan ini adalah ukuran tingkat partisipasi masyarakat, semakin besar kemampuan untuk menentukan nasib sendiri, maka semakin besar pula partisipasi masyarakat tersebut dalam pembangunan. Dengan hal ini program pemerintah diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat yang bermukim disekitar Pantai Samboang berupa ide, gagasan, pemikiran dan lain-lain demi kelancaran pelaksanaan program pemerintah terkait pengembangan objek wisata Pantai Samboang di Kabupaten Bulukumba pada khususnya. Selain dari pada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata Pantai di Samboang dalam bentuk tenaga juga masyarakat memiliki partisipasi masyarakat dalam bentuk ide/pemikiran seperti wacana akan diadakan event pemancingan nasional

disana, dengan mendatangkan para pecinta mancing mania, seperti yang diungkapkan oleh ZA dalam hal ini kepala lingkungan erelebu barat, bahwa:

“Termasuk saya ini sudah berpartisipasi sebagai masyarakat, saya pernah dan saya ingin membuat event pemancingan ditingkat kabupaten dan kalau perlu ditingkat provinsi, supaya kita bisa undang pencinta-pencinta mancing mania dengan tujuan untuk mencintai ekosistem laut yang dikenal dekat taman tarumbu karangnya yang memukau dan memperkenalkan bahwa di Kabupaten Bulukumba ini ada sebuah pantai yang indah, bagus, eksotiks sebenarnya kalau ditata dan dikelola dengan baik dan benar serta secara profesional” (hasil wawancara, 19 juli 2017).

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata Pantai Samboang dalam bentuk ide/pemikiran. Seperti inilah contohnya, dengan akan diadakannya *event* seperti yang disebutkan diatas, maka hal ini menjadi batu loncatan untuk berkembangnya objek wisata di Pantai Samboang, karena secara otomatis banyak pengunjung yang akan mengikuti *event* ini, tapi lagi hal tersebut membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah setempat. Ketika akan diadakan *event* seperti ini maka masyarakat dan pemerintah harus menjadi *partnert* kerja sekali gus menjadi tim yang bisa mengembangkan objek wisata Pantai Samboang. Tanggapan HN selaku masyarakat bahwa:

“Ketika ada masyarakat sendiri yang berinisiatif untuk membuat event pemancingan maka kami sebagai bagian dari elemant masyarakat harus turut serta dalam pelaksanaan itu, karena suatu kebanggaan pribadi buat kami ketika kampug kami menjadi tujuan para jagoan mincing, apalagi ditinggkat provinsi, jadi kami sangat antusias menghadapi event ini agar supaya pantai Samboang juga banyak dikenal dan dilirik oleh para wisatawan dan dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat sendiri dan secara otomatis pemerintah lebih memfokuskan perhatiannya pada pantai Samboang dan berusaha untuk membuat fasilitas-fasilitas yang masih kurang disini” (hasil wawancara, 06 february 2018)

Tanggapan masyarakat setempat lainnya tentang perencanaan event pemancingan tingkat provinsi cukup antusias karena bisa mempromosikan

kelebihan yang dimiliki pantai Samboang, seperti yang diungkapkan oleh BA selaku Camat Bonto Tiro dalam hal ini diwakilkan, bahwa :

“Kami sebagai pemerintah setempat tentunya sangat mendukung hal ini apalagi tingkat provinsi, ini bisa membuat pantai Samboang banyak dikenal oleh para pecandu wisatawan, kesejahteraan masyarakat juga bisa meningkat dan tentunya pemasukan dari PAD pantai Samboang bisa diperhitungkan, semoga ini cepat terealisasi” ( hasil wawancara, 06 februari 2018)

Pemancingan tingkat provinsi menjadi hal yang paling ditunggu oleh segenap masyarakat Bonto Tiro karena akan membuat Pantai Samboang menjadi lebih terkenal dan terekspos serta mampu menambah jumlah pendapatan masyarakat setempat dan tentunya PAD Kabupaten Bulukumba menjadi besar, seperti tanggapan yang diungkapkan oleh Kepala Lingkungan Ere Lebu Timur bahwa:

“Pemancingan tingkat provinsi bisa menjadi sarana buat kami sebagai kepala masyarakat disini untuk mampu menambahkan pendapatan masyarakat kami karena secara otomatis banyak pecinta mincing yang datang dan menunjukkan keahliannya tentunya ini akan berdampak pada kecamatan dan tentunya kami sebagai kepala lingkungan yang notabeneanya pantai Samboang berada dilokasi kami, tentu akan membantu pemerintah dan masyarakat untuk penyediaan alat-alat yang dibutuhkan selama pemancingan diadakan” (hasil wawancara, 06 februari 2018)

Sambutan yang diberikan kepala lingkungan Ere Lebu Timur persoalan perencanaan pemancingan sangat antusias bahkan bersama masyarakatnya akan menyediakan peralatan yang dibutuhkan para peserta yang akan mengikuti pemancingan kelak. Seperti yang diungkapkan oleh AR selaku tokoh masyarakat (pakar) bahwa:

“Kami siap-siap saja ketika event ini diadakan dan kita akan membantu pemerintah dan masyarakat lain untuk semua kebutuhannya, dan tentunya

ini tidak boleh lepas dari tanggung jawab kami sebagai masyarakat ketika ini terlaksana” (hasil wawancara, 06 februari 2018)

Sambutan masyarakat masalah rencana pengadaan event pemancingan tersebut sangat antusias dan bersama masyarakat yang lain akan turut serta dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam bentuk ide/pemikiran salah satunya adalah mengadakan event pemancingan tingkat provinsi, dengan diadakannya event tersebut maka ini adalah langkah awal masyarakat setempat dan merupakan sarana untuk mempromosikan Pantai Samboang dan merupakan ide cemerlang agar Pantai Samboang banyak dikenal dan ketahui dari berbagai kalangan masyarakat sehingga ketika mereka mengetahuinya maka wisatawan akan berdatangan dan pada tentunya kesejahteraan masyarakat setempat bisa meningkat.

### **C. Faktor pendukung dan penghambat dari partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata Pantai Samboang di Kabupaten Bulukumba**

Dalam menata dan memperindah sebuah objek wisata atau apapun itu, terutama dalam pengelolaan objek wisata pantai apalagi kalau objek wisata tersebut masih dalam keadaan baru maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut yaitu faktor pendukung dan factor penghambat dalam pengelolaan objek wisata Pantai Samboang di Kabupaten Bulukumba. Faktor ini harus dihadapi dan dialami oleh masyarakat setempat juga pemerintah setempat yang jelas berperan penting dalam pengelolaan objek wisata Pantai Samboang di Kabupaten Bulukumba. Adapun faktor pendukung (a) Kesiapan pemerintah dalam kebutuhan utama objek wisata pantai, (b) Dukungan nyata yang diberikan

pemerintah untuk masyarakat. faktor penghambat (a) Masyarakat kurang sadar wisata yang menyebabkan kurang wisatawan yang berkunjung sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat, (b) Tingginya tarif retribusi, (c) Fasilitas kurang dan tidak terawat, dapat dilihat dalam rincian berikut ini :

### **1. Faktor pendukung dari partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata Pantai Samboang di Kabupaten Bulukumba**

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata Pantai Samboang di Kabupaten Bulukumba pada dasarnya memiliki faktor yang mendukung keberhasilan objek wisata Samboang sehingga Pantai Samboang ini bisa banyak terdengar dikalangan masyarakat manapun, tentu dengan hal tersebut faktor pendukung dari adanya partisipasi masyarakat khususnya dalam pengelolaan objek wisata, (a) Kesiapan pemerintah dalam melihat kebutuhan utama objek wisata pantai, (b) Dukungan nyata yang diberikan pemerintah untuk masyarakat, ini dapat dilihat sebagai berikut:

#### **1.a Kesiapan pemerintah dalam melihat kebutuhan utama objek wisata pantai**

Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan tidak hanya merupakan usaha pemerintah semata atau masyarakat saja, akan tetapi suatu kegiatan bersama yang hasilnya diharapkan dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh AR, selaku pihak dari Dinas Pariwisata, bahwa :

“Pihak Pemda sendiri telah membuat infrastruktur jalan 2 jalur, jalur masuk dan jalur keluar pada tahun 2015 yang langsung menuju bibir pantai, dibuatnya gedung aula pertemuan samboang, merupakan dukungan nyata pemerintah pada perkembangan samboang” (hasil wawancara, 17 juli 2017)

Keberhasilan sebuah objek wisata pantai ditandai dengan adanya infrastruktur yang bangun oleh pemerintah setempat. Dan Pantai Samboang sendiri telah memiliki infrastruktur yang cukup memadai sebagai sarana pendukung wisatawan ketika berkunjung dilokasi wisata tersebut, dibuatnya infrastruktur jalan dengan dua jalur yang mengarah langsung ke bibir pantai ini memudahkan wisatawan untuk membawa kendaraan mereka ke bibir pantai, dan memudahkan akses mereka. Seperti yang diungkapkan oleh HN sebagai masyarakat bahwa:

“Pemerintah memang telah siap menghadapi persaingan dengan objek wisata yang lain sehingga pemerintah membuat dan memfasilitasi masyarakat setempat untuk membuat sumur bor, agar supaya wisatawan tidak kekurangan air, apalagi air disini sangat susah, karena harus diangkut jauh-jauh, jadi pemerintah siap membantu kebutuhan-kebutuhan wisata dipantai ini sehingga saya sebagai masyarakat ketika ada keluarga yang akan berkunjung, tidak memikirkan lagi masalah air, kesiapan pemerintah yang lain itu adalah menghimbau masyarakat setempat dalam hal ini pedagang kaki lima (PKL) agar mau berjualan di sekitaran pantai pada hari sabtu minggu, kenapa hari sabtu dan minggu, karena dihari itu biasa banyak wisatawan yang berkunjung, akan tetapi tidak selalu seperti hari-hari besar seperti idul fitri maupun idul adha” (hasil wawancara, 06 februari 2018)

Kesiapan dan kesiagaan pemerintah dalam melihat kebutuhan masyarakat pada pantai Samboang sangat jelas, karena pemerintah memfasilitasi masyarakatnya dalam membuat sumur bor dan mengizinkan masyarakat untuk tetap berjualan di sekitaran pantai Samboang, dan membuat jalan menuju pantai pasir putih Samboang, sehingga bisa menambah pendapatan masyarakat Ere Lebu Timur, Senada dengan yang diungkapkan AR selaku kepala Dinas Pariwisata, bahwa:

“Dinas tata ruang dan pekerjaan umum telah membuatkan jalan 2 jalur menuju pantai samboang, tentunya tidak lepas dari campur tangan

masyarakat, inilah bentuk dukungan dan perhatian pemerintah terhadap adanya pantai Samboang, supaya ada jalan keluar dan jalan masuk menuju Sambong, agar supaya memudahkan wisatawan lain ketika berkunjung dipantai tersebut” (hasil wawancara, 17 juni 2017)

Dinas terkait telah melakukan kerja sama dengan dinas Pariwisata untuk membuat jalan bersama masyarakat dalam menata dan mengelolah perkembangan objek wisata pantai Samboang sehingga memudahkan wisatawan jika berkunjung dipantai tersebut. Berdasarkan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa perhatian pemerintah akan kebutuhan fasilitas wisata sangat besar hanya saja perlu perhatian yang lebih lagi dalam peningkatan pendapatan masyarakat agar bisa mensejahterakan keluarganya. Adapun tanggapan RI selaku masyarakat tentang hal diatas bahwa:

“Kami sebagai masyarakat berantusias ketika pemerintah peduli kepada kami karena kami bisa apa kalau pemerintah tidak peduli, padahal pekerjaan sehari-hari kami itu hanya melaut untuk mencukupi kebutuhan keluarga, apalagi suami saya sudah tidak ada, jadi beruntung ketika pemerintah menganggarkan dan membuat jalan menuju pantai karena dulu itu jalannya masih setapak” (hasil wawancara, 23 juli 2017).

Kesadaran pemerintah tentang kebutuhan sebuah objek wisata sangat besar karena respon masyarakat masalah pembuatan jalur 2 ini di tanggapi secara baik, positif dan antusias oleh masyarakat, sehingga bisa menjadi mitra kerja yang berkesinambungan oleh karena itu kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kesiapan pemerintah dalam melihat kebutuhan sebuah objek wisata pantai disambut langsung oleh masyarakat sehingga bisa menjalin mitra kerja sama yang baik antara masyarakat dan pengayomnya agar kesejahteraan masyarakat bisa bertambah.



### **1.b Dukungan nyata yang diberikan pemerintah untuk masyarakat**

Faktor pendukung lainnya dalam pengelolaan objek wisata pantai Samboang adalah dukungan nyata yang diberikan pemerintah untuk masyarakat, seperti dengan yang diutarakan oleh Camat Bonto Tiro dalam hal ini diwakili oleh Kasi Pemerintahan yakni BA bahwa,

“Faktor pendukung dari pengelolaan objek wisata Pantai Samboang yaitu,, pemerintah setempat sendiri sangat mendukung adanya Pantai Samboang ini, masyarakat berpartisipasi dengan adanya pariwisata disini dalam kebersihan saja dan Dinas Pariwisata lebih khusus menangani dan menaungi ini. Bukti bahwa pemerintah sangat mendukung hal ini yaitu mengarahkan masyarakat setempat untuk berdagang supaya peningkatan pendapatannya bisa bertambah” (hasil wawancara, 19 juli 2017)

Dukungan nyata yang diberikan pemerintah untuk masyarakat dengan adanya Pantai Samboang ini adalah dengan memberikan izin kepada para pedagang kaki lima untuk menjajakan dagangannya disekitaran pantai, sehingga kesejahteraan masyarakat bisa terlaksana. Sama halnya yang dikatakan oleh MR selaku Kepala Lingkungan Erelebu Timur, bahwa

“Dari pemerintah, dukungannya ada. Kalau dari masyarakat sendiri itu mereka hanya membangun vila-vila” (hasil wawancara, 21 juli 2017)

Harapan masyarakat terhadap keberhasilan pengelolaan objek wisata Pantai Samboang cukup tinggi, namun perlu disadari bahwa berpartisipasi dalam pengelolaan objek wisata Pantai diperlukan kerja keras dari masyarakat dan pemerintah sendiri yang dalam hal ini kedua element keberhasilan sebuah objek wisata adalah dengan kerja sama dan didukung oleh hal-hal lain. Berdasarkan uraian hasil observasi dan wawancara diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dukungan pemerintah atas objek wisata Pantai Samboang itu

cukup besar, akan tetapi banyak kendala yang terjadi, terutama dalam hal kesejahteraan masyarakatnya. Dan setiap dukungan pemerintah juga di *support* dan disambut langsung oleh masyarakat setempat demi sebuah tujuan yang telah ditargetkan. senada yang dikemukakan BA selaku wakil dari Camat Bonto Tiro dalam hal ini Kasi Pemerintahan bahwa,

“Kalau partisipasi masyarakat itu bagus, kenapa saya bilang bagus karena ada biasa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di pantai seperti acara dan hari-hari kemerdekaan, sekaligus memotivasi masyarakat untuk berwisata di Pantai Samboang, hanya saja fasilitas-fasilitas pemerintahan terbatas sehingga objek wisata tersebut kurang diminati oleh wisatawan”. (hasil wawancara, 19 juli 2017).

Masyarakat pada dasarnya memiliki partisipasi nyata dalam pengelolaan objek wisata Pantai Samboang dalam hal ini ikut serta dalam setiap kegiatan kegiatan yang berlangsung dengan meramaikannya. Masyarakat setempat juga sangat berambisi untuk memperkenalkan objek wisata pantai ini melalui kegiatan-kegiatan yang halau oleh pemerintah. Seperti yang dibahas dan dibahasakan oleh lurah Eka Tiro yang diwakili oleh ZA, dalam hal ini Kepala Lingkungan Ere Lebu Barat sebagai berikut

“Partisipasi masyarakat setempat sangat bagus, kenapa saya katakan bagus karena, mereka sangat menginginkan Pantai Samboang lebih indah, cantik, eksotis dan lebih terkenal lebih terkhusus di Kota Bulukumba, di Provinsi Sul-Sel bahkan sampai di Manca Negara. Apalagi Pantai Samboang ini ketika dibandingkan dengan Pantai Tanah Lot di Pulau Dewata Bali maka akan lebih terkenal, mereka sadar ketika Pantai Samboang ini di tata dan di kelola dengan baik dan professional maka akan menambah *incame* pendapatan masyarakat setempat. Dan saya lihat masyarakat yang notabenenya memiliki perekonomian yang baik, mereka membangun vila sebagai tempat penginapan wisatawan ketika berkunjung, dan tentunya hasil tersebut menjadi milik mereka. Namun pada hari ini karena pimpinan tertinggi di Kota Bulukumba telah berganti maka seperti inilah Pantai Samboang sekarang, pembangunannya tidak berkesinambungan dan tidak ada tindak lanjut” (hasil wawancara, 19 juli 2017).

Berdasarkan analisa penulis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata Pantai Samboang itu sangat besar dan antusias, akan tetapi mereka membutuhkan dukungan yang sangat besar oleh pemerintah setempat dalam hal ini Bupati Bulukumba periode sekarang yaitu bapak H. Andi Syukri Sappewali, karena pada dasarnya untuk menciptakan suatu objek wisata yang menarik dan banyak dikunjungi oleh wisatawan maka pemerintah memang harus turun tangan untuk hal ini, meskipun tidak sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah setempat setidaknya ada investor yang ingin menanamkan modalnya untuk objek wisata yang berpotensi menghasilkan dan mensejahterakan masyarakat setempat, senada dengan yang dikemukakan oleh MR selaku Kepala Lingkungan Erelebu Timur yang lokasi Pantai Samboang berada didaerahnya, bahwa

“Partisipasinya masyarakat sangat mendukung akan tetapi investor tidak ada yang masuk, supaya ada perkembangan. Kalau masyarakat sendiri itu sangat jauh dari harapan mungkin, kerena mau ambil biaya dari mana? Pendapat mereka hanya ketika pergi kelaut mencari ikan yang hasilnya hanya untuk memenuhi ekonomi sehari-hari saja, itupun sangat minim” (hasil wawancara, 21 juli 2017)

Sependapat oleh AR selaku tokoh masyarakat yaitu

“Ya partisipasi masyarakat sangat baik, mereka mendukung, hanya untuk melaksanakan perkembangan, itu jauh dari harapan karena masalah dana sedangkan untuk kebutuhan sehari-harinya belum terpenuhi ”(hasil wawancara, 21 juli 2017)

Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara berkenjutan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata Pantai Samboang di Kabupaten Bulukumba tidak terlepas dari proses partisipasi masyarakat yang begitu besar dan nyata, dimana

masyarakat sangat antusias dalam melakukan pengelolaan objek wisata Pantai Samboang, Namun mereka hanya perlu dukungan nyata, dalam hal ini menganggarkan pengelolaan objek wisata tersebut, sehingga mereka tidak sekedar ada.

## **2. Faktor penghambat dari partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata Pantai Samboang di Kabupaten Bulukumba**

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata Pantai Samboang memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi wisatawan untuk berkunjung ke lokasi tersebut. Menurut pandangan awal peneliti dalam melihat faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata, terdapat beberapa faktor yaitu (a) masyarakat tidak sadar tentang wisata, (b) tingginya tarif retribusi, (c) kurangnya fasilitas, dengan ini maka dapat dilihat dalam rincian berikut ini

### **2.a Masyarakat kurang sadar tentang wisata**

Sadar wisata dapat didefinisikan sebagai sebuah konsep yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh kembangnya kepariwisataan di suatu wilayah dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat setempat akan wisata membuat dan berpengaruh terhadap pengunjung yang berkunjung ke objek wisata ini, berdasarkan hal ini seperti yang dikemukakan dengan rasa kecewa oleh AS di lokasi bahwa

“Saya datang jauh-jauh dari Surabaya karena kebetulan ada kerjaan di kota Makassar dan pekerjaannya telah selesai, saya bermaksud mau *refreshing*

di Pantai Samboang. Dan apa yang ditemukan di sini hanya ada balapan liar, apalagi sampah berserakan dimana-mana, banyak perahu parkir, gazebo yang kotor, pantai ini cocoknya sebagai tempat mancing, bukan buat hiburan setelah otak bekerja secara ekstra, pemandangannya bagus indah tapi yang membuat saya tidak nyaman adalah ini terkesan liar dan kayaknya kurang terawat” (hasil wawancara tanggal 23 juli 2017).

Kurangnya fasilitas dan daya tarik wisatawan yang ada di lokasi membuat wisatawan menjadi tidak bergairah untuk liburan yang kedua kalinya, yang membuat objek wisata Pantai Samboang peminatnya semakin berkurang. Jelas karena kekecewaan yang mendalam oleh salah satu informan sendiri. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata Pantai Samboang memang sangat dibutuhkan dalam menunjang perkembangan suatu objek wisata untuk bisa mensejahterakan masyarakat setempat. Senada yang diungkapkan oleh HN selaku masyarakat bahwa:

”Pantai samboang kurang pengunjungnya karena banyaknya remaja-remaja disini ketika ada wisatawan mancanegara (Bule) yang berenang, mereka melihat-lihat bule tersebut, padahal mereka butuh privasi dan kenyamanan dalam menikmati keindahan pantai. Belum lagi banyak balapan liar disana (sambil menunjuk lokasi balapan liar), disinilah tanggung jawab Dinas terkait dalam hal ini Kepolisian untuk mengamankan balapan liar tersebut, kadang di moment-moment tertentu ada polisi yang mengamankan tapi tdiak setiap hari, ditambah lagi sampah berserakan dimana-mana karena sampah kiriman, walaupun ada budaya yang diterapkan yaitu budaya LISA (Lihat Sampah Ambil) dan Go Greend tapi itu tidak bertahan lama karena mereka juga bosan dan kewalahan dalam membersihkan karena wisatawan tak kunjung datang” (hasil wawancara, 06 februari 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa banyaknya masyarakat yang kurang sadar wisata sehingga pengunjung menjadi berkurang, balapan liar dimana-mana serta sampah berserahkan menjadikan pantai Samboang kurang dikunjungi oleh wisatawan. Seperti yang diungkapkan oleh

Lurah Ekatiro dalam hal ini ZA Selaku Kepala Lingkungan Ere Lebu Barat, bahwa :

“Masyarakat setempat masih kurang sadar wisata contoh, saya kemarin ketika bertemu dengan wisatawan mancanegara, warga Jerman dan dan dua warga Prancis, mereka sedang berenang dipantai, mereka dikerumuni dan dilihat-lihat, jelas adanya bahwa mereka akan tersinggung atas perlakuan masyarakat setempat. Mereka butuh privasi dan kebebasan dalam menikmati keindahan pantai akan tetapi itu semua terganggu karena hal tersebut. Itulah ketidak sadaran masyarakat bahwa ketika samboang ini ingin dijadikan objek wisata yang terkenal dan bagus akan keindahannya, maka wisatawan lokal dan manca Negara disambut dengan baik, dijaga privasinya, diberikan kebebasan, jangan datang disitu berkumpul sambil melihat-lihat, kan tidak enak. Jadi kesadaran wisata masyarakat di Samboang masih sangat kurang. Dan itu adalah salah satu yang menghambat kenapa Pantai Samboang sampai hari ini tidak terkenal padahal sudah di ekspos dan dipromosikan karena kedarasan masyarakat yang belum tahu persis bahwa bagaimana menyambut wisatawan, menata dan mengelolah seperti inilah contohnya, mereka masih kurang sadar” (hasil wawancara, 19 juli 2017)

Bahwa ketika wisatawan berkunjung di Pantai Samboang mereka kurang menemukan kebebasan dalam menikmati keindahan alam yang disuguhkan, hanya rasa kecewa yang mereka rasakan ketika berkunjung di objek wisata di Pantai Samboang. Kurangnya wisatawan yang berkunjung ke Pantai Samboang menjadi tugas besar bagi pemerintah setempat, menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat setempat. Mengapa hal demikian terjadi karena banyaknya objek wisata lain yang menjadi saingan Pantai Samboang ini, seperti yang diungkapkan oleh RA selaku bagian dari Dinas Pariwisata, bahwa:

“Kurangnya wisatawan yang berkunjung di Pantai Samboang, rata-rata wisatawan beralih ke pantai Tanjung Bira dan Pantai Apparalang yang notabeneanya lebih indah dari Pantai Samboang ini, mereka mau liat apa di samboang? Mau lihat sampah, mau liat balapan liar, otomatis itu bukan tujuan mereka, mereka hanya mau rekreasi. Serta tarif distribusi yang sangat tinggi bisa mencapai 100 ribu per mobil” (hasil wawancara, 17 juli 2017)

Banyaknya objek wisata pantai yang ada di Kabupaten Bulukumba menjadikan Pantai Samboang sedikit bahkan nyaris tidak ada pengunjung. Terjadinya hal yang tidak diinginkan oleh para wisatawan di lokasi membuat mereka menjadi malas untuk berkunjung yang kedua kalinya. Disinilah pemerintah harus betul-betul memikirkan hal ini. Pemerintah harus mengubah paradigma wisatawan yang berkunjung kesana sehingga wisatawan tetap mau dan tetap berkunjung kesini. Senada dengan yang di ungkapkan oleh MM selaku wisatawan bahwa:

“Pertama kali saya berkunjung kesini, tidak ada saya lihat ini orang datang disini rekreasi, ya mungkin mereka di pantai lain seperti Bira, Apparalang Marumasa dan pantai lainnya, saya juga sepertinya tidak akan mengulang kejadian ini untuk berkunjung kesini” ( hasil wawancara 26 juli 2017)

Kekecewaan yang diungkapkan MM ketika berkunjung adalah bukti bahwa memang Pantai Samboang masih perlu untuk dibenahi, dan memang banyak membutuhkan anggaran dalam pembenahannya, seperti pemerintah mengundang para investor untuk menanamkan modal usahanya di Pantai Samboang. Seperti yang dikatakan MR selaku Kepala Lingkungan Ere Lebu Timur, bahwa :

“Tidak adanya investor yang masuk menanamkan modal, kita banyak membutuhkan anggaran, ketika hanya keadaan ekonomi masyarakat yang diharapkan untuk mengubah Samboang ini maka kita akan sangat tertinggal jauh, karena untuk makan saja mereka susah” ( hasil wawancara, 21 juli 2017)

Tingginya kebutuhan masyarakat dan harga sembako yang semakin melejit, membuat masyarakat sangat mengharapkan adanya investor yang akan menanamkan modalnya disamping pemerintah tidak mampu menganggarkan

pengelolaan objek wisata Pantai Samboang karena masih banyak kebutuhan-kebutuhan masyarakat lainnya seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Tak berbeda dengan yang dikemukakan oleh AR dinas pariwisata bahwa :

“Melihat pengunjung yang nyaris tidak ada maka kesejahteraan masyarakat setempat tidak ada. Apa yang bisa mensejahterakan mereka kalau pengunjung tidak ada? Ketika pengunjung banyak yang berdatangan pasti masyarakat setempat sejahtera karena pengunjung membelanjakan uangnya di daerah tersebut, menginap di penginapan dan jajan-jajan,tapi kalau tidak ada pengunjung ?” (hasil wawancara,17 juli 2017)

Kurangnya pengunjung adalah sebab utama dari kesejahteraan masyarakat karena ketika banyak pengunjung yang berdatangan maka secara otomatis pengunjung tersebut membelanjakan uangnya disekitaran dan kawasan Pantai Samboang. Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kesejahteraan masyarakat sangat ditentukan oleh jumlah pengunjung yang berkunjung dan membelanjakan uangnya disekitaran Pantai Samboang, minimnya pengunjung harus membuat Pemerintah untuk bekerja lebih keras lagi agar bagaimana Pantai Samboang ini bisa banyak wisatawan yang berkunjung seperti halnya Pantai Tanjung Bira yang pengunjungnya sangat banyak, tentunya juga tidak lepas dari partisipasi masyarakat yang berperan penting dalam hal tersebut.

Kurangnya sadar wisata masyarakat merupakan salah satu hambatan yang sangat penting untuk diatasi karena sangat mempengaruhi keramaian suatu objek wisata Pemerintah setempat harus jeli melihat kekurangan-kekurangan masyarakat agar mereka bisa dibekali dengan hal yang membuat mereka tahu bagaimana cara menyambut para wisatawan dengan baik, seperti diadakannya sosialisasi tentang sadar wisata oleh pemerintah sebagai penunjang dan bekal mereka dalam



menyambut wisatawan. Pertanyaan yang paling mendasar ketika sebuah objek wisata berada di lokasi adalah bagaimana kesejahteraan masyarakat setempat. Hasil penelitian berkelanjutan dan observasi penulis menemukan titik terang dari masalah masyarakat setempat dengan adanya objek pariwisata Pantai Samboang. Seperti yang diungkapkan oleh RI dalam hal ini selaku masyarakat, bahwa:

“Saya sebagai masyarakat disini, dengan adanya ini pantai disini tidak ada efeknya karena tidak ada penghasilan yang bisa diambil dari pantai ini, ya kita hanya pergi melaut untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Tidak ada lagi pendapatan lain selain pergi melaut, seperti ini yang saya temukan ditengah laut, ada kerang, gurita masih banyak lain, jadi kalau kita tanyakan bagaimana kesejahteraan masyarakat disini, dengan jelas saya katakan bahwa tidak ada sama sekali kecuali musiman” (hasil wawancara, 20 juli 2017 )

Ungkapan rasa kecewa yang mendalam oleh salah satu masyarakat mengenai kesejahteraan hidupnya dengan adanya Pantai Samboang itu tidak ada sama sekali, karena kebanyakan mereka harus pergi melaut untuk mendapatkan dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa sadar wisata merupakan kunci keberhasilan sebuah objek wisata. Namun yang terjadi di lapangan adalah masyarakat setempat kurang sadar wisata. Oleh Karena itu pemerintah harus mengadakan sosialisasi tentang sadar wisata terkhusus untuk masyarakat Lingkungan Ere Lebu Timur, sehingga mereka bisa menegetahui bagaimana cara melayani wisatawan-wisatawa yang berkunjung. Dengan seperti itu secara otomatis kesejahteraan masyarakat bisa meningkat.

## **2.b Tingginya tarif retribusi**

Tingginya tarif retribusi juga menjadi kendala bagi wisatawan untuk berkunjung ke Pantai Samboang karena ketika mereka masuk ke Pantai

Samboang, harga di tarif cukup tinggi seperti yang dikatakan oleh ZA selaku Lurah Eka Tiro dalam hal ini diwakilkan oleh Kepala Lingkungan Ere Lebu Barat, bahwa :

“Tingginya tarif retribusi, serta banyaknya balapan liar di bibir pantai, sampai di dalam pantai bukan kesenangan yang didapatkan melainkan rasa kecewa karena tarif retribusi yang terlalu tinggi menjadi tidak seimbang dan inbas dengan apa yang disuguhkan di bibir pantai, ya balapan liar, disinilah sebenarnya tugasnya Aparat Keamanan dalam hal ini Kepolisian untuk menertibkan balapan liar tersebut, selain meresahkan masyarakat juga mengganggu pemandangan..” (hasil wawancara, 19 juli 2017).

Tingginya tarif retribusi yang diraut dari pengunjung yang berkunjung merupakan salah satu penghambat bagi para wisatawan untuk berkunjung. Berdasarkan pendapat diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa keseimbangan tarif retribusi bisa menunjang pengunjung untuk tetap berkunjung di lokasi wisata, akan tetapi tingginya tarif retribusi yang cukup menguras kantong wisatawan seperti yang diungkapkan oleh ZA bahwa :

“Hari ini Samboang setiap orang masuk ditarik retribusi masuk sebesar Rp. 50 000,00.- permobil dan kadang-kadang ketika ada memont-moment tertentu seperti tahun baru, pasca hari raya idul fitri maupun idul adha itu bisa mencapai Rp. 100 000,00.- permobilnya. Tapi hasil retribusi tersebut bukan diperuntukkan dan dialokasikan untuk masyarakat setempat, langsung diambil oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba, entah uangnya dimasukkan ke pendapatan Asli Daerah (PAD) atau bagaimana, saya kurang pasti itu, yang jelas ada retribusi masuk kepantai yang diambil oleh petugas dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bulukumba retribusi yang ditarik dilokasi wisata jangan langsung dimasukkan ke PAD tapi sisipkanlah sedikit untuk pembangunan Pantai Samboang misalnya membuat tempat sampah, atau memperbaiki jalan-jalan yang rusak” (hasil wawancara, 19 juli 2017)

Seandainya tarif retribusi yang ditarik dari wisatawan seimbang dengan apa yang ada di dalam Pantai Samboang, secara otomatis wisatawan tidak segan-segan untuk mengeluarkan uangnya walaupun dalam jumlah banyak, akan tetapi

jika hasil yang dituai tidak seimbang, maka wisatawan protes dan tidak akan mengunjungi Pantai Samboang untuk yang kedua kalinya. Berdasarkan pernyataan diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa tarif retribusi yang diraut dari wisatawan sangat tinggi dan tidak seimbang dengan apa yang disuguhkan di lokasi pantai. senada yang dikatakan oleh ZA dalam hal ini Lurah Eka Tiro bahwa,

“Tidak ada, hampir tidak ada nilai tambah untuk kesejahteraan masyarakatnya, karena Pantai Samboang sedikit pengunjungnya dalam artian pengunjung Pantai Samboang itu musiman seperti moment-moment tertentu seperti tahun baru, masa libur panjang, lebaran idul fitri dan idul adha dan retribusi yang ditarik kadang mencapai Rp. 100 000 per mobil dan tentunya hasil dari retribusi ini masuk di Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bulukumba. Inilah kesempatan masyarakat untuk mengambil keuntungan dengan berdagang disekitaran pantai dan yang memiliki vila bisa mempromosikan vilanya untuk tempat penginapan. Oleh karena Pantai Samboang belum ditata dan dikelola dengan baik oleh Pemerintah seperti Pantai Tanjung Bira dan kurangnya promosi wisata terhadap Pantai Samboang menyebabkan pengunjung kurang mendatangi pantai ini untuk rekreasi, ini menjadi tugas besar bagi pemerintah setempat untuk mempromosikan pantai ini” (hasil wawancara, 19 juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai bagaimana kesejahteraan masyarakat Kelurahan Ere Lebu Timur Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba dengan adanya objek wisata Pantai Samboang, Senada yang diungkapkan oleh AS selaku wisatawan, bahwa:

“Retribusi yang ditarik ketika ma masuk di Pantai Samboang itu sangat tinggi, biasa mencapai Rp. 100.000 permobil, dan yang disuguhkan di pantai Samboang juga tidak ada yang istimewa, biasa ada wisatawan yang kecewa, tidak apa-apalah ketika tarif retribusinya tinggi akan tetapi harus sesuai juga dengan apa yang didapatkan di pantai” (hasil wawancara, 26 juli 2017)

Tingginya tarif retribusi menjadikan wisatawan tidak mau mengeluarkan uangnya untuk biaya masuk saja, Karena tidak sesuai dengan apa yang

diharapkan. Senada dengan yang diungkapkan oleh MM selaku wisatawan, bahwa:

“Banyak sekali biaya masuk disini, kemudian apa yang ditemukan hanya sampah berserahkan, tempat duduknya juga kotor, tidak ada warung makan, banyak sekali yang kurang tapi berlebihan tarif retribusinya” (hasil wawancara, 26 juli 2017)

Tingginya tarif retribusi membuat banyak wisatawan yang berkunjung mengeluh, sehingga berdampak pada menurunnya angka wisatawan, seperti yang diungkapkan oleh HN selaku masyarakat, bahwa:

“Memang uang masuknya itu banyak sekali apalagi ketika tahun baru kemarin, banyak yang mengeluh mulai dari harga 60 ribu sampai 150 ribu, banyak yang komplent di media sosial mengenai uang masuknya, ini bisa membuat minat para wisatawan yang belum pernah berkunjung akan hilang dan bahkan pengunjung akan semakin berkurang, melihat banyak lagi tempat rekreasi yang lain di Bonto Bahari” (hasil wawancara, 06 februari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kesejahteraan masyarakat Kelurahan Eka Tiro pada khususnya dan Kecamatan Bonto Tiro pada umumnya dengan adanya Pantai Samboang itu tidak ada tambahan pendapatan, bahkan tidak ada nilai tambah, akan tetapi kesejahteraan masyarakat setempat bisa bertambah atau sejahtera dalam hal ini pemerintah harus bercermin pada apa yang diterapkan oleh pengelola-pengelola objek wisata lainnya seperti Pantai Bira yang dekat dari Pantai Samboang, Pulau Dewata Bali dan lain-lain sebagainya, yang bisa melakukan hal ini selain pemerintah, dengan mendukung, dan *memback up* habis agar supaya kesejahteraan masyarakat dapat meningkat, akan tetapi hari ini belum ditata dan dikelolah dengan baik oleh pemerintah, seharusnya pemerintah mengatur retribusi lagi agar tidak mahal karena bisa mengurangi wisatawan yang berkunjung.

### **2.c Kurangnya fasilitas**

Fasilitas yang disiapkan disuatu objek wisata sangat menunjang dan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung kesana akan tetapi fasilitas-fasilitas yang ditemui di Pantai Samboang itu sangat minim, hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh AR Dinas Pariwisata, bahwa:

“Di Pantai Samboang kurang fasilitaskah, kurang bersihkah, bagaimanakah, nah itu yang menjadi kendala disana, artinya masyarakat juga disana mau dikatakan kurang peduli, terus peduli, lalu apa juga pedulinya karena kalau kita mau memperindah, mempercantik itu semua butuh biaya, lalu biaya dari mana? Itu menjadi kendala bagi masyarakat disana. Kemudian kami dari pihak Pemda pernah mengusulkan pada tahun 2015 untuk membuat kolam renang di bibir pantai dan sudah dianggarkan sekitar 1 M tapi ternyata tidak bisa dibuat karena harus ada izin dari Kementerian Kelautan. Akhirnya rencana ini tinggal rencana dan dialihkan ke pembangunan penginapan, mess-mess, gazebo, panggung, peping blok, tempat rapat yang diberi nama aula pertemuan dan gedung samboang. Hal ini menandakan bahwa Pemda juga peduli dengan Objek wisata Pantai Samboang.” (hasil wawancara, 17 juni 2017)

Kurangnya fasilitas yang disediakan di Pantai Samboang membuat para wisatawan jenuh untuk berkunjung dan tidak memiliki daya tarik tersendiri, masyarakat sangat peduli dengan fasilitas yang ada disana hanya saja fasilitasnya masih kurang, yang ada hanya fasilitas umum seperti gazebo, mess-mess, vila-vila, aula pertemuan dan lain-lain. Hal ini membuktikan bahwa argument dari salah satu wisatawan ada benarnya, sesuai dengan yang dikemukakan oleh AR Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata, bahwa:

“Karena terlalu banyaknya objek wisata lain, fasilitas-fasilitas di Pantai Samboang agak kurang, serta Pantai Samboang ini kayaknya tidak terawat dan mungkin masyarakat setempat kurang berpartisipasi, mereka vakum dan tidak peduli, mereka acuh dan tidak mau tau”.(hasil wawancara, 17 juli 2017).

Kurangnya fasilitas yang ada di Pantai Samboang serta banyaknya objek wisata lain yang menjadi saingan pantai tersebut dapat mengurangi daya tarik wisatawan untuk berkunjung kesana. Maka berdasarkan hal ini pemerintah harus lebih cerdas lagi menghadapi masalah-masalah seperti ini. Seperti yang diungkapkan oleh HN selaku masyarakat bahwa:

“Fasilitas yang tersedia dipantai Samboang sangat kurang, seperti papan bicara, pedang biasanya tidak ada kalau bukan hari sabtu minggu, tempat parkir tidak menentu jadi biasanya kalau ada wisatawan yang berkunjung itu parker sembarang, kadang dibibir pantai parkir, tempat sampah juga belum dibuat, apalagi setiap hari minggu itu pemuda-pemuda khususnya mengadakan balapan liar, jadi membuat risi para wisatawan, dan masih banyak lagi”(hasil wawancara, 06 februari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa penyebab wisatawan kurang berkunjung ada minimnya fasilitas pantai seperti tempat smapah, pedagang yang masih kurang dalam hal ini kuliner, seperti sepperti yang diungkapkan oleh AS selaku wisatawan, bahwa:

“Baru kali ini saya kepantai, saya tidak melihat ada warung makannya apalagi wisata kulinernya, bagaimana bisa banyak pengunjungnya jika warung makan saja tidak ditemukan dilokasi pantai, padahal kita berwisata kesini karena mau rileks dan santai bukan malah kelaparan”(hasil wawancara, 26 juli 2017)

Kesuksesan sebuah objek wisata pantai, ketika mampu membuat para wisatawannya tidak mengeluh dan kelaparan, berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa fasilitas objek wisata, penentu dari keramaian sebuah pantai karena ketertarikan wisatawan untuk berkunjung ke pantai, adalah tersedianya fasilitas yang diinginkan, akan tetapi jika fasilitasnya yang kurang, maka pemerintah harus melihat lagi kebutuhan-kebutuhan objek wisata pantai Samboang secara khusus.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Bersadarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bagian sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut ;

1. Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Samboang di Kabupaten Bulukumba dalam bentuk (1) Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, (a) masyarakat menyumbangkan lahannya untuk pelebaran jalan, (b) menghibahkan tanahnya sebagai fasilitas wisata (dalam pembangunan Villa), dengan menghibahkan sebagian tanahnya untuk membangun vila adalah kewajiban masyarakat setempat agar supaya pantai Smaboang memiliki fasilitas. (2) Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan masyarakat Lingkungan Ere Lebu Timur kelurahan Eka Tiro dalam bentuk (a) gotong royong dalam kebersihan, semangat masyarakat untuk bergotong royong sehingga bisa menciptakan pantai yang bersih (b) meramaikan acara kemerdekaan. Antusias masyarakat untuk meramaikan acara kemerdekaan, sangat bersemangat. (3) Partisipasi buah pikiran/ide adalah partisipasi masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya di Pantai Samboang dengan memberikan pendapat seperti (a) pembuatan kolam renang, perencanaan pembuatan kolam renang di bibir pantai Samboang pernah di diskusikan oleh pemerintah dan masyarakat, akan tetapi Dinas terkait tidak member izin karena beriko merusak ekosistem laut (b) event

pemancingan tingkat provinsi, kegiatan akan diadakan event pemancingan tingkat Provinsi

2. Faktor Pendukung dan faktor Penghambat Partisipasi masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pantai Samboang Di kabupaten Bulukumba. (1) Faktor pendukung partisipasi masyarakat (a) Kesiapan pemerintah dalam kebutuhan utama objek wisata pantai, kesiagaan pemerintah dalam memperhitungkan kebutuhan wisata patut diacungi jempol karena membantu dan memfasilitasi masyarakat dalam pembuatan sumur bor, pemuatan jalan dan menghimbau masyarakat agar tetap berjauhan disekitaran pantai (b) Dukungan nyata yang diberikan pemerintah untuk masyarakat. dengan memberikan wacana kepada masyarakat bahwa pemerintah mendukung masyarakat akan adanya pantai Samboang, dengan begitu kesejahteraan masyarakat bisa meningkat (2) faktor penghambat partisipasi masyarakat (a) Masyarakat kurang sadar wisata yang menyebabkan kurang wisatawan yang berkunjung sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat (b) Tingginya tarif retribusi, hal yang menjadi alasan wisatawan untuk tidak berkunjung ke pantai Samboang karena tarif harganya yang tidak sesuai dengan fasilitas yang ada (c) kurangnya fasilitas, hambatan dari pantai samboang salah satunya fasilitas yang kurang yang mengakibatkan daya tarik wisatawan berkurang

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan masyarakat Ere Lbebu Timur Kelurahan Eka Tiro Kecamatan Bonto Tiro kabupaten Bulukumba belum meningkat karena kurangnya wisatawan yang berkunjung.



**B. SARAN**

1. Diperlukan adanya fasilitator yang loyal menjaga dan merawat fasilitas yang ada dipantai Samboang
2. Diharapkan fasilitator juga mengingatkan kepada masyarakat agar tetap eksis menjalankan program pemerintah sehingga bisa di wariskan kepada generasi penerus.
3. Kiranya mempertahankan agar pengunjung tetap berdatangan dari berbagai pejuru, maka diperlukan pemerintah untuk membina dan mengayomi masyarakat terutama mengadakan sosialisasi sadar wisata untuk perkembangan Pantai Samboang selanjutnya
4. Harus mempertahankan dan menjaga tradisi masyarakat setempat untuk tetap kerja sama dan gotong royong dalam membersihkan pantai
5. Diharapkan meningkatkan lagi peran pemerintah dan peran masyarakat dalam pengelolaan objek wisata
6. Diharapkan Dinas Kepolosian untuk mengamankan balapan liar
7. Kiranya tarif retribusi pantai dikurangi

## DAFTAR PUSTAKA

- Setiawan, Ari. 2015. Skripsi: *Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebersihan objek wisata pantai tanjung bira di Kabupaten bulukumba*. Makassar. Administrasi Negara
- Bagyono. 2007. *Pariwisata Dan Perhotelan*. Bandung: alfabeta. Cek 2.
- Hamalik, Oemar 1993, *Pengelolaan Sistem Informasi*, Bandung; Triagenda Karya.
- Hamijoyo. 2007. *Partisipasi Dalam Pembangunan*. Jakarta: Depdikbud.
- Hasibuan, S.P Malayu, 2001, *Manajemen (Dasar, Pengertian Dan Masalah)*, Bandung: Bumi Aksara.
- Isbandi Rukminto Adi, 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Asset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Jakarta: FISIP UI Press.
- Mappamiring. 2011. *Partisipatif manajemen pengelolaan*. Makassar. YAPMA Makassar.
- Manullang, 2004. *Dasar-dasar Manajemen*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mardikanto, T. dkk. 2001. *Prosedur Penelitian Penyuluhan Pembangunan*. Surakarta: Prima There Pressindo.
- Moeloeng, Lexy, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*: Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mukarram. 2010. *Jurnal Kepariwisata Volume Tiga No. 1 Agustus 2010*. Makassar: Akademi Pariwisata Makassar.
- Nanang Fattah, 2004. *Landasan manajemen*, Jakarta: Remaja Rosdakarya
- Samsuddin, saladi, 2006, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sastrohadiwiryono, B. Siswanto. 2002. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia: Pendekatan Administratif Dan Oprasional*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Slamet, Margono. 1993. *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Bogor: IPB. Press.
- Soetomo, 2006, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sunarto & Jajuk Herawati, 2000. *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE

Wahab, Salah. 2003. *Manajemen Kepariwisataaan*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

**Internet.**

<http://reallifethedreamer.blogspot.co.id>

[http://hello Makassar.com/indahya-pasir-putih-sejauh-mata-memandang-dipantai-samboang/](http://helloMakassar.com/indahya-pasir-putih-sejauh-mata-memandang-dipantai-samboang/).

[http://www.kabar Sulawesi.com/2013/03/ surge bawah laut Pantai Samboang.html](http://www.kabarSulawesi.com/2013/03/surge-bawah-laut-Pantai-Samboang.html)=1.

**Undang-undang**

Keppres Nomor 38 tahun 2005 tentang pengembangan wisata di Indonesia

Lampiran II.11 Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21

Peraturan daerah kabupaten bulukumba pasal 14 tahun 2009, tentang rencana pengembangan objek wisata.

Undang- undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan.

Undang-undang nomor 9 tahun 2009 tentang kepariwisataan.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Nurmanika, disapa dengan Itha. Lahir pada tanggal 04 Mei 1995 di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. Anak pertama dari tiga bersaudara yang merupakan anak dari pasangan suami istri Muh. Basri dan Darmawati. Penulis menempuh pendidikan pertama di MIN Bontomanai selama enam Tahun dan selesai pada tahun 2007. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah pertama di SMPN 3 Bulukumba dan selesai pada tahun 2010. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah kejuruan di SMK Negeri 1 Bulukumba dan selesai pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, di Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan program Studi Ilmu Administrasi Negara. Penulis sangat bersyukur, karena telah diberikan kesempatan untuk menimba ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diamalkan dan memberikan manfaat.